

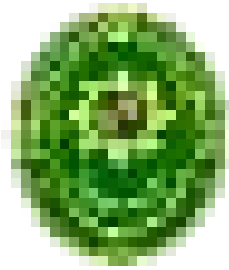


PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2022

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnपालेबंग@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

2022

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transfaransi Badan Peradilan

NILAI - NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

HUBUNGI KAMI MELALUI



pnpalembang@gmail.com



0811-7115-599



<http://pn-palembang.go.id/>



Pengadilan Negeri Palembang



[pnpalembang](https://www.instagram.com/pnpalembang)



Pengadilan Negeri Palembang

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar dan Grafik	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020-2024	11
B. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	67
D. Monitoring dan Evaluasi	73
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 1	Pencapaian Kinerja Keseluruhan	vii
Tabel 2	Sasaran Strategis 1	viii
Tabel 3	Sasaran Strategis 2	viii
Tabel 4	Sasaran Strategis 3	ix
Tabel 5	Sasaran Strategis 4	ix
Tabel 6	DIPA 01 (BUA) Tahun 2022	ix
Tabel 7	DIPA 03 (BADILUM) Tahun 2022	x
Tabel 8	Uraian Tugas Aparatur PN Palembang Kelas 1A Khusus	4
Tabel 9	Hubungan Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 10	Matriks reviu rencana strategis tahun 2020-2024	15
Tabel 11	Rencana Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 12	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 13	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 14	Sasaran I	25
Tabel 15	Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu 2022	26
Tabel 16	Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1	27
Tabel 17	Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu	28
Tabel 18	Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu 2020-2022	28
Tabel 19	Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	31
Tabel 20	Perkara Pidana yang diputus/diselesaikan tepat waktu 2020-2022	31
Tabel 21	Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu	35
Tabel 22	Perkara PidSus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu 2020-2022	36
Tabel 23	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	36
Tabel 24	Data perkara Pidana Tahun 2022	36
Tabel 25	Data perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya banding 2022	37
Tabel 26	Data perkara Perdata tahun 2022	41
Tabel 27	Data perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2022	41
Tabel 28	Data perkara Tipikor tahun 2022	42
Tabel 29	Data perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2022	43
Tabel 30	Data perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020-2022	43
Tabel 31	Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2022	40
Tabel 32	Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 per triwulan	41
Tabel 33	Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2022	41

DAFTAR TABEL

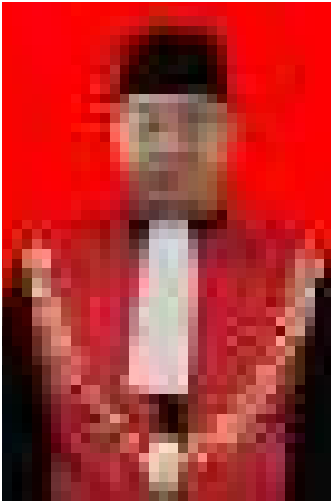
Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 34	Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 pertriwulan	42
Tabel 35	Perkara PHI yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2022	42
Tabel 36	Perkara Tipikor yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2022	43
Tabel 37	Perkara Tipikor yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 pertriwulan	43
Tabel 38	Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022	44
Tabel 39	Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversiun 2020- 2022	46
Tabel 40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	47
Tabel 41	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	47
Tabel 42	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 2020-2022	48
Tabel 43	Sasaran 2	49
Tabel 44	Salinan Putusan Perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022	51
Tabel 45	Salinan Putusan Perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022	51
Tabel 46	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022	52
Tabel 48	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022	52
Tabel 49	Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020- 2022	55
Tabel 50	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022	57
Tabel 51	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022	57
Tabel 52	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022	59
Tabel 53	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2022	59
Tabel 54	Sasaran 3	60
Tabel 55	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	61
Tabel 56	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum 2020-2022	62
Tabel 57	Sasaran 4	62
Tabel 58	Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	63
Tabel 59	Data Permohonan Eksekusi yang telah selesai tahun 2022	66
Tabel 60	Data Permohonan Eksekusi yang telah selesai tahun 2020-2022	66
Tabel 61	Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) BUA	68
Tabel 62	Belanja Pegawai	68
Tabel 63	Belanja Barang	69
Tabel 64	Belanja Modal	70
Tabel 65	Belanja Barang DIPA 03	72

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Nomor	Nama Grafik	Hal
Grafik 1	Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator	27
Grafik 2	Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022	29
Grafik 3	Perkara Pidana yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022	31
Grafik 4	Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022	33
Grafik 5	Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022	38
Grafik 6	Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022	45
Grafik 7	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022	53
Grafik 8	Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020- 2022	55
Grafik 9	Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022	57
Grafik 10	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2022	59
Grafik 11	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum 2020-2022	62
Grafik 12	Belanja Pegawai	68
Grafik 13	Belanja Barang	70
Grafik 14	Belanja Modal	70
Grafik 15	Belanja Barang DIPA 03	72

Nomor	Nama Gambar	Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang	4
Gambar 2	Sosialisasi Eksternal E-Berpadu	7
Gambar 3	Tampilan e-Court MA RI	7
Gambar 4	Tampilan PTSP Prioritas	8
Gambar 5	Tampilan Video animasi alur pelayanan PTSP	8
Gambar 6	Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	15
Gambar 7	Tampilan Aplikasi Komdanas	73

KATA PENGANTAR

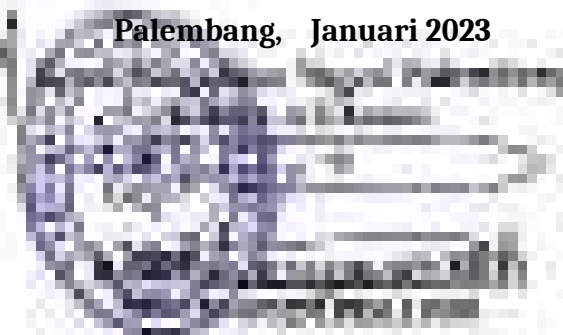


Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022 telah dapat diselesaikan. LKjIP Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022 menggambarkan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Pengadilan Negeri Palembang ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapan kami laporan ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun agar kedepannya kami dapat meningkatkan kinerja untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palembang, Januari 2023





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Palembang.

Pengadilan Negeri Palembang telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 16 (enam belas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Keseluruhan		
No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	114,68%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	88,34%
3	Meningkatnya Akses bagi Masyarakat Miskin , dan Terpinggirkan	100,00 %
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	191,36%

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Keseluruhan

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik bahkan melebihi target, yaitu Sasaran Strategis 1,3, dan 4 sedangkan Sasaran Strategis 2 hanya terealisasi sebesar 88,34 %. Secara Keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang adalah sebesar **123,59%**. Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	96,01%	111,63%
2	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116,27%
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	99,72%	115,95%
4	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86%	96,29%	111,96%

SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%	0%	0%
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	76%	96,83%	127,40%
7	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	76%	106,84%	140,57%
8	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	100%	200%
9	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	94,05%	103.35%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1				114,68%

Tabel 2 Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	94,42%	94,42%
2	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
4	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	96,29 %	96,29%
5	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,06 %	51%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2				88,34%

Tabel 3 Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin, dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3				100 %

Tabel 4 Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	65%	124,39%	191,36%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4				191,36%

Tabel 5 Sasaran Strategis 4

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2022 yaitu:

DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) TA.2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 15.714.760.000,-	Rp.14.892.936.705,-	94,77%
2	Belanja Barang	Rp. 2.851.280.000,-	Rp. 2.728.207.302,-	95,68%
3	Belanja Modal	Rp. 502.000.000,-	Rp. 500.604.000,-	99,72%
Jumlah		Rp. 19.092.907.000,-	Rp.18.146.359.507,-	95,04%

Tabel 6 DIPA 01 (BUA) Tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 19.092.907.000,- dan realisasi DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.18.146.359.507.000,- dengan persentase realisasi sebesar 95,04%.

DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) TA.2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Percepatan penyelesaian perkara	Rp. 10.000.000,-	Rp. 8.194.000,-	81,94%
2	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	Rp.485.867.000,-	Rp.473.773.220,-	95,54%
3	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama	RP. 114.233.000,-	Rp.100,919.990,-	88,25%
4	Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat pertama	Rp.88.235.000,-	Rp.82.537.500,-	93,54%
5	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.24.000.000,-	Rp.24.000.000,-	100%
Jumlah		Rp.723.335.000,-	Rp.689.424.710,-	95,31%

Tabel 7 DIPA 03 (BADILUM) Tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 723.335.000,- dan realisasi DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.689.424.710,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,31%. Maka, tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun.



**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden tersebut diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instruksi Presiden tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar inilah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kota Palembang, menyusun LKjIP Tahun 2022. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya.

Laporan kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana Strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan menyajikan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

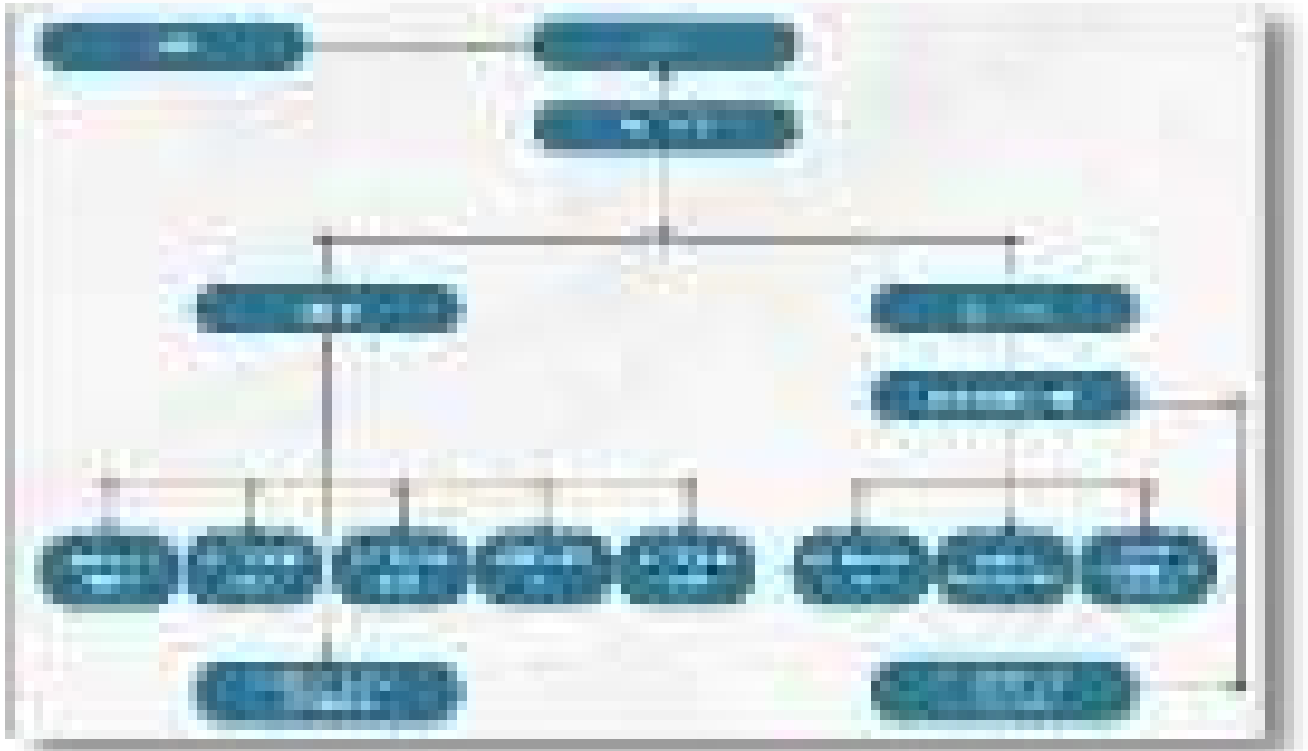
Dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perdata. Selain itu, Pengadilan Negeri Palembang sebagai Pengadilan Khusus mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sedangkan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah:

- **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri pada tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di pengadilan negeri merupakan hakim di mata undang-undang dan ulama di masyarakat (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- **Fungsi sebagai Mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh beberapa pihak, maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).
- **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- **Fungsi lainnya**, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

Uraian Tugas Aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

Ketua Pengadilan Negeri
Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin, Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
Majelis Hakim
Mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara/ Kepaniteraan (Perdata, Pidana, Hukum, PHI, Tipikor) dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).

Panitera	Sekretaris
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara yang terdiri atas Perdata, Pidana, Hukum, PHI dan Tipikor, mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti.	Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekreteris Pengadilan Negeri dibantu oleh satu orang Kepala Bagian yaitu kepala bagian umum.
Panitera Muda Perdata	Kepala Bagian Umum
Melaksanakan Administrasi perkara di bidang Perdata	Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.
Panitera Muda Pidana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Melaksanakan Administrasi perkara di bidang Pidana	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Panitera Muda Khusus (Tipikor dan PHI)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Melaksanakan Administrasi perkara di bidang perkara khusus yaitu Tipikor dan PHI	Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
Panitera Muda Hukum	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Panitera Pengganti	
Membantu majelis Hakim dalam persidangan serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.	
Jurusita/Jurusita Pengganti	
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.	
Jabatan fungsional	
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya, masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.	

Tabel 8 Uraian Tugas Aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965, pada tanggal 8 September 1964 yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah hukum yang meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati dan Kecamatan Jakabaring.

Peran Pengadilan Negeri Palembang sebagai Pengadilan Kelas 1A Khusus memiliki peran strategis dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan peran strategisnya selama kurun waktu tahun 2022, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Palembang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi para pencari keadilan.

Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selama tahun 2022 terkait dengan kemajuan atau perubahan lembaga peradilan umum khususnya di Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

01 e-Berpadu

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Pengadilan Negeri Palembang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang Pengadilan Tingkat Bandingnya (Pengadilan Tinggi Palembang) menjadi pilot project implementasi aplikasi e-Berpadu. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2022.

Untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada pihak-pihak Penegak Hukum terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Agustus 2022 mengadakan sosialisasi Eksternal e-Berpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang. Aplikasi e-Berpadu ini hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan



Gambar 2 Sosialisasi Eksternal E-Berpadu

perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum yang disediakan adalah untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

02 e-Court

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, MA menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019.



Gambar 3 Tampilan e-Court MA RI

Bahkan, dari Perma ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan Perma ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun Tergugat tidak menyetujuinya.

03 PTSP Proritas

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Palembang kembali menjadikan hal ini sebagai salah satu isu strategis yang memerlukan inovasi atau perbaruan demi mewujudkan akses yang sama dan pemberian akses penuh bagi penyandang disabilitas ke semua layanan pengadilan.



Gambar 4 Tampilan PTSP Prioritas

PTSP Pengadilan Negeri Palembang memiliki layanan prioritas yang ditujukan terhadap kaum disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi-inovasi yang dapat memudahkan para pencari keadilan dengan disabilitas. Layanan PTSP (Prioritas) bertujuan untuk membantu para kaum Prioritas, dalam mendapat akses layanan yang mudah dan cepat serta mendapat

layanan prima di PTSP Pengadilan Negeri Palembang. Layanan Kartu Prioritas, Lembar Penilaian Personal Disabilitas, Alur Layanan PTSP Prioritas, dan Tempat Duduk prioritas diharapkan dapat menjadi prasarana serta keadilan bagi kelompok prioritas dalam bentuk upaya percepatan akses dalam mendapatkan pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Palembang. Inovasi pelayanan PTSP bagi kaum disabilitas juga dilengkapi dengan video animasi alur pelayanan PTSP. Penyampaian informasi secara audio visual menggunakan



Gambar 5 Tampilan Video animasi alur pelayanan PTSP

Bahasa isyarat tentang Alur Pelayanan PTSP bagi Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas yang datang ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dapat mengetahui pelayanan-pelayanan yang dapat diperoleh dengan mudah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Palembang yang berisikan antara lain Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi pada Pengadilan dan sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain Rencana Strategis 2020–2024, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang yang terdiri dari Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Yang terdiri dari:

- Struktur Organisasi
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Matrik Rencana Strategis 2020-2024
- Rencana Kinerja Tahun 2020,2021, dan 2022
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**BAB
II**

**PERENCANAAN
DAN
PENETAPAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan gambaran proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang. Visi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG AGUNG”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transfaransi Badan Peradilan

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam Tahun 2020 – 2024. Hubungan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Hubungan Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
			2	Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan
			3	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
			4	Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan
			5	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif
			6	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan
			8	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi
			9	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Indek kepuasan pencari keadilan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata yang diminutasi/dikirim
			2	Persentase salinan putusan perkara Perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata khusus (PHI) yang diminutasi/dikirim
			3	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara PIDANA yang diminutasi/dikirim
			4	Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi/dikirim
			5	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi

Tabel 9 Hubungan Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

5. Program utama & Kegiatan

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Palembang, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Administrasi.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

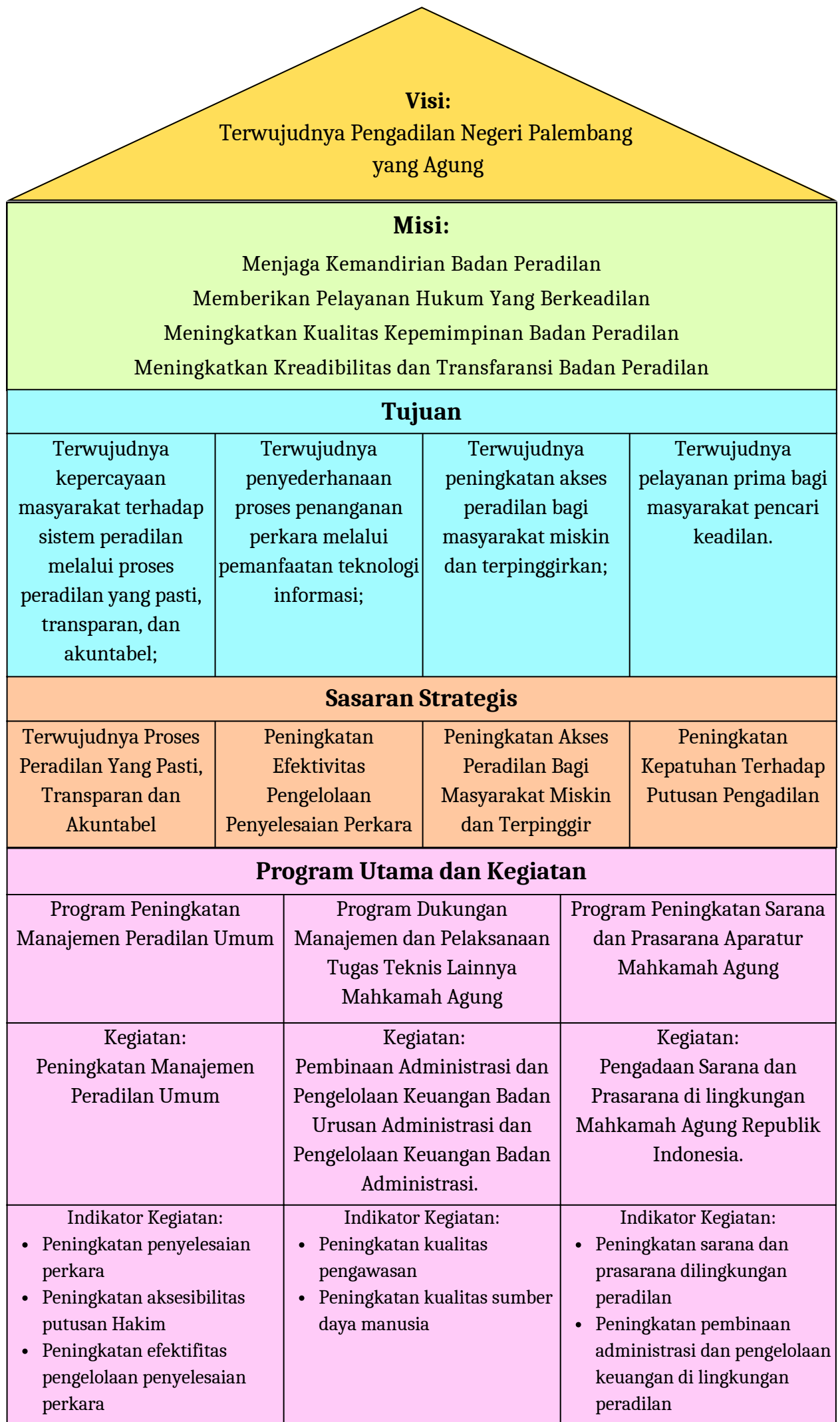
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan
- b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus



Gambar 6 Framework Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

B. MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

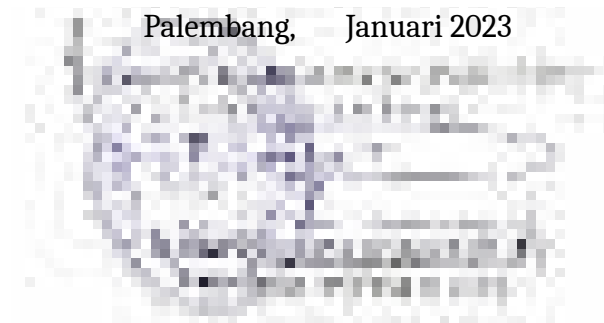
Instansi	Pengadilan Negeri Palembang
Visi	Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	75	85	86	87	88
2		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
3		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
4		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
5		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	2	2	2

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	75	76	77	78
7		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	75	76	77	78
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20	5	5	6	6
9		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50	90	91	92	93
10	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11		Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
12		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
13		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
14		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	5	6	7	7
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100	100	100
16	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	70	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	65	65	70	70

Palembang, Januari 2023



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Palembang memuat angka rencana kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	76%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	91%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%

Tabel 11 Rencana Kinerja Tahun 2022

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan untuk tahun berikutnya, yang pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Palembang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	76%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	91%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%

Tabel 12 Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**BAB
III**

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja dari RENSTRA Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari RENSTRA Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini:

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	86%	96,01%	111,63%
2		Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	86%	100%	116,27%
3		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%	99,72%	115,95%
4		Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	86%	96,29%	111,96%
5		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2%	0%	0%
6		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	76%	96,83%	127,40%
7		Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	76%	106,84%	140,57%
8		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	100%	200%
9		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	94,05%	103,35%
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	94,42%	94,42%
11		Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
12		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
13		Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	96,29%	96,29%
14		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,06 %	51%
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	65%	124,39%	191,36%

Tabel 13 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024. Sasaran ini terdiri dari 9 (sembilan) indikator, yaitu:

1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu
5. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
6. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
7. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
9. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	99.21%	93.11%	96,01%	132.28%	109.54%	111,63%
2	Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	100%	69.58%	100%	132%	81.85%	116,27%
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	100%	100%	99,72%	133.33%	117.64%	115,95%
4	Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	75%	85%	86%	100%	100%	96,29%	133.33%	117.64%	111,96%
5	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	75%	76%	52.06%	80.80%	96,83%	123.44%	107.73%	127,40%
7	Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	70%	75%	76%	43.23%	81.67%	106,84%	74.37%	108.89%	140,57%
8	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	5%	5%	5%	4.81%	100%	100%	96.2%	200%
9	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50%	90%	91%	90.41%	99.68%	94,05%	180.82%	110.75%	103,35%
Rata-rata capaian sasaran 1 pada tahun 2022										114,12%

Tabel 14 Sasaran I

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja:

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 86%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu (<5bulan)	Keterangan
Januari	Gugatan	38	34	Untuk tahun 2022 Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan sebanyak 904 Perkara, dan Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 868 Perkara
	Gugatan Sederhana	28	28	
	Permohonan	27	27	
Total		93	89	
Februari	Gugatan	17	15	
	Gugatan Sederhana	15	15	
	Permohonan	37	37	
Total		69	67	
Maret	Gugatan	24	23	
	Gugatan Sederhana	49	49	
	Permohonan	17	17	
Total		90	89	
April	Gugatan	24	18	
	Gugatan Sederhana	17	17	
	Permohonan	30	30	
Total		71	65	
Mei	Gugatan	19	14	
	Gugatan Sederhana	13	13	
	Permohonan	10	10	
Total		42	37	
Juni	Gugatan	16	12	
	Gugatan Sederhana	19	19	
	Permohonan	25	25	
Total		60	56	
Juli	Gugatan	25	17	
	Gugatan Sederhana	20	20	
	Permohonan	19	29	
Total		64	66	
Agustus	Gugatan	32	27	
	Gugatan Sederhana	19	19	
	Permohonan	42	42	
Total		93	88	
September	Gugatan	36	30	
	Gugatan Sederhana	19	19	
	Permohonan	19	19	
Total		74	68	
Oktober	Gugatan	20	17	
	Gugatan Sederhana	21	21	
	Permohonan	41	41	
Total		82	79	
November	Gugatan	26	24	
	Gugatan Sederhana	29	29	
	Permohonan	30	30	
Total		85	83	
Desember	Gugatan	30	30	
	Gugatan Sederhana	14	14	
	Permohonan	37	37	
Total		81	81	
Total Keseluruhan Tahun 2022		904	868	96,01 %

Tabel 15 Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

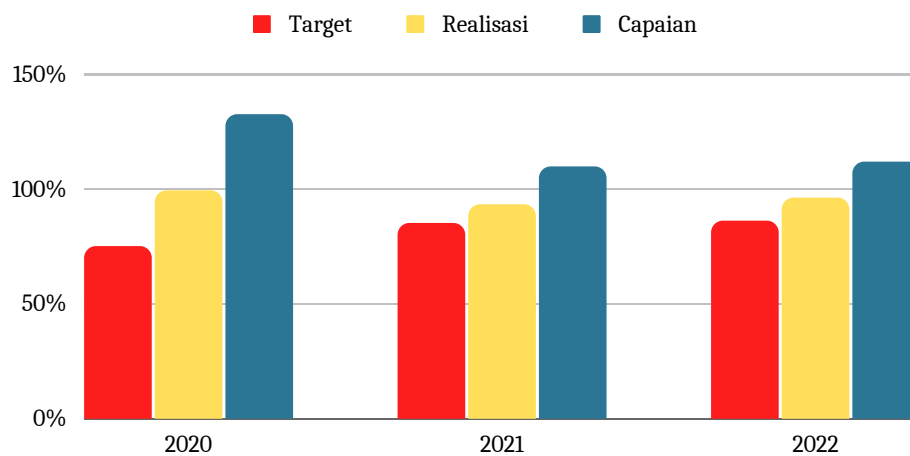
Selama tahun 2022 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 904 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 868 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **96,01 %**.

Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Jenis Perkara	Tahun	Perkara yang Diselesaikan	Perkara Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2020	255	253	75%	99.21%	132.28%
	2021	436	406	85%	93.11%	109.54%
	2022	904	868	86%	96,01%	111,63%

Tabel 16 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Tabel 16 menunjukkan data tahun 2022, bahwa capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai **111,63 %**.



Grafik 1 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat penurunan persentase pada capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Namun, terjadi tren positif pada tahun berikutnya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan dari 109.54% menjadi 111.63% dan sudah memenuhi bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan signifikan dari jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, pada tahun 2021 berjumlah 406 perkara menjadi 868 perkara pada tahun 2022.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Indikator Kinerja:

2. Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang di selesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 87 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan/ diputus	Perkara selesai tepat waktu/ putus (<5 bln)	Keterangan
PHI	Januari	17	17	Untuk Tahun 2022 Jumlah perkara yang diselesaikan/putus sebanyak 193 perkara, dan semuanya dapat diselesaikan tepat
	Febuari	7	7	
	Maret	14	14	
	April	41	41	
	Mei	15	15	
	Juni	16	16	
	Juli	1	1	
	Agustus	5	5	
	September	19	19	
	Oktober	22	22	
	November	15	15	
	Desember	21	21	
Jumlah		193	193	100%

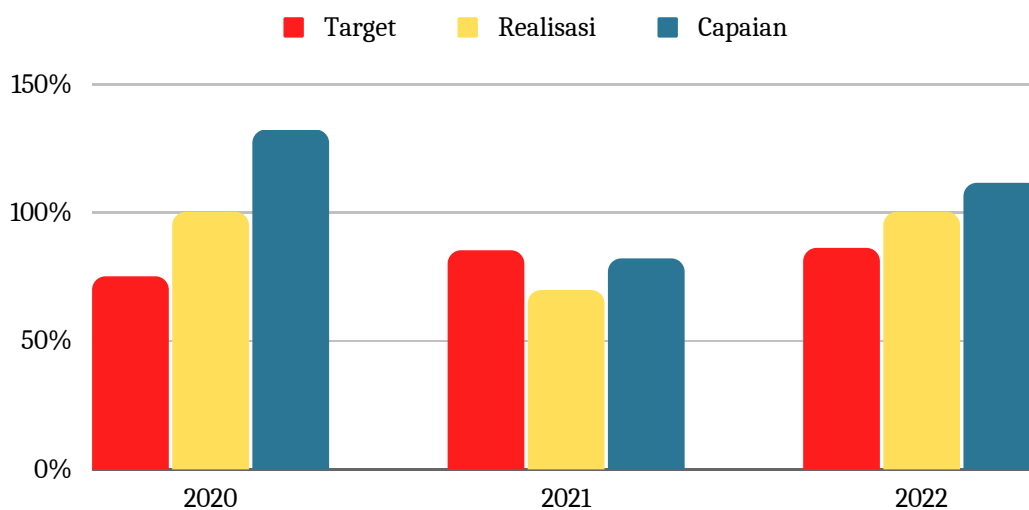
Tabel 17 Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu

Selama tahun 2022 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 193 perkara, dan semua perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 193 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Jenis Perkara	Tahun	Perkara yang Diselesaikan	Perkara Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu	2020	150	150	75%	100%	132%
	2021	365	254	85%	69.58%	81.85%
	2022	193	193	86%	100%	116,27%

Tabel 18 Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022

Tabel 18 menunjukkan data tahun 2022, bahwa capaian penyelesaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai **116,27 %**.



Grafik 2 Perkara PHI yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Peningkatan jumlah perkara PHI yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2021 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi banyaknya karyawan yang terkena PHK. Lonjakan perkara PHI yang masuk mengakibatkan rendahnya realisasi dan capaian pada tahun 2021 diakibatkan oleh kurangnya majelis Hakim yang menangani perkara PHI baik karena kurangnya pengadaan hakim maupun mutasi hakim. Namun, pada tahun 2022 keadaan perkara PHI kembali normal. Persentase realisasi dan capaian Perkara Perdata Khusus (PHI) pada tahun 2022 yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi target. Itu berarti, semua perkara PHI dapat diselesaikan tepat waktu



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama tahun 2022, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui MIS dan monev perkara secara langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
- SOP Penyelesaian Perkara PHI telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

3. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 86%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu (<5bulan)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu	Keterangan
Januari	Pidana Biasa	155	155	155	Untuk Tahun 2022 Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan sebanyak 1837 perkara dan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 sebanyak 1832 Perkara
	Pidana Anak	4	4	4	
	Total	159	159	159	
Februari	Pidana biasa	137	136	136	
	Pidana Anak	7	7	7	
	Total	144	143	143	
Maret	Pidana biasa	167	166	166	
	Pidana Anak	5	5	5	
	Total	172	171	171	
April	Pidana biasa	162	161	161	
	Pidana Anak	10	10	10	
	Total	172	171	171	
Mei	Pidana biasa	126	125	125	
	Pidana Anak	3	3	3	
	Total	129	128	128	
Juni	Pidana biasa	185	185	185	
	Pidana Anak	11	11	11	
	Total	196	196	196	
Juli	Pidana biasa	115	115	155	
	Pidana Anak	7	7	7	
	Total	122	122	122	
Agustus	Pidana biasa	161	161	161	
	Pidana Anak	2	2	2	
	Total	163	163	163	
September	Pidana biasa	139	138	138	
	Pidana Anak	8	8	8	
	Total	147	146	146	

Bulan	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu (<5bulan)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu	Keterangan	
Oktober	Pidana biasa	130	130	130		
	Pidana Anak	2	2	2		
	Total	132	132	132		
November	Pidana biasa	177	177	177		
	Pidana Anak	9	9	9		
	Total	186	186	186		
Desember	Pidana biasa	107	107	107		
	Pidana Anak	8	8	8		
	Total	115	115	115		
Total Keseluruhan Tahun 2022		1837	1832	1832		99,72%

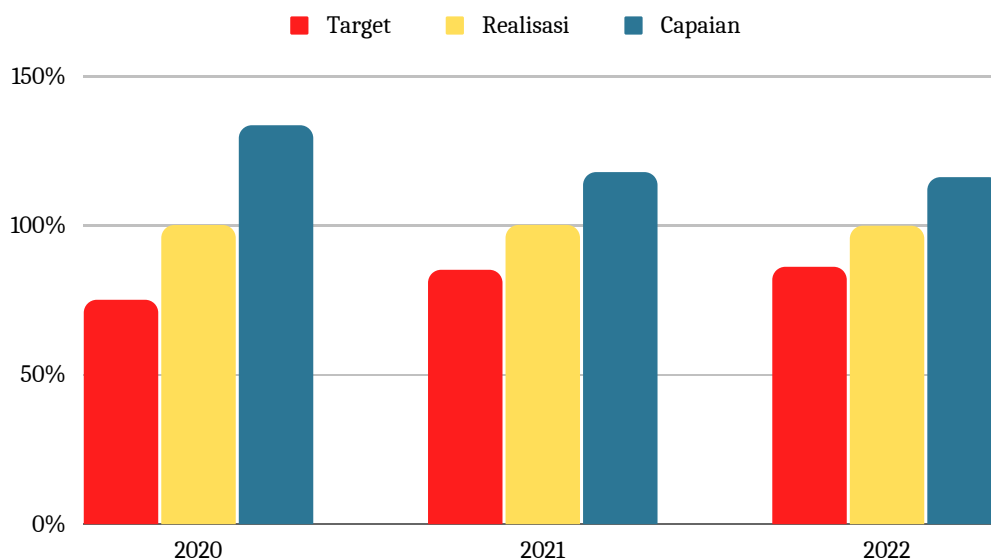
Tabel 19 Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Selama tahun 2022 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 1837 perkara dan telah diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan) sebanyak 1832 perkara. Berdasarkan data di atas didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,72 %.

Jenis Perkara	Tahun	Perkara yang Diselesaikan	Perkara Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2020	2074	2074	75%	100%	133.33%
	2021	1914	1914	85%	100%	117.64%
	2022	1837	1832	86%	99,72%	115,95%

Tabel 20 Perkara Pidana yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022

Tabel 20 menunjukkan data tahun 2022, bahwa capaian penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 115,95 %.



Grafik 3 Perkara Pidana yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Terjadi penurunan realisasi, target dan capaian penyelesaian perkara pidana dengan tepat waktu. Terdapat 5 perkara yang tidak diselesaikan dengan tepat waktu pada Tahun 2022 yang mengakibatkan realisasi tidak 100%. Namun, walaupun demikian Perkara Persentase Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Tahun 2022 tetap memenuhi target yang sudah ditentukan dan memiliki capaian 115,95%. Bahkan, target yang ditetapkan setiap tahun memiliki peningkatan persentase. Dari 75% pada tahun 2020, meningkat 10% menjadi 85% pada tahun 2021 dan 86% pada tahun 2022.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan, antara lain?

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui MIS dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

4. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 86%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan/ diputus	Perkara selesai tepat waktu/ putus (<5 bln)	Keterangan
Pidana Khusus (Tipikor)	Januari	8	8	Untuk Tahun 2022 Jumlah perkara diselesaikan/putus sebanyak 81 perkara dan perkara diselesaikan tepat waktu sebanyak 78 perkara
	Februari	7	7	
	Maret	4	4	
	April	3	3	
	Mei	13	13	
	Juni	4	1	

Perkara	Bulan	Perkara yang diselesaikan/ diputus	Perkara selesai tepat waktu/ putus (<5 bln)	Keterangan
	Juli	10	10	
	Agustus	4	4	
	September	7	7	
	Oktober	7	7	
	November	11	11	
	Desember	3	3	
Jumlah		81	78	96,29%

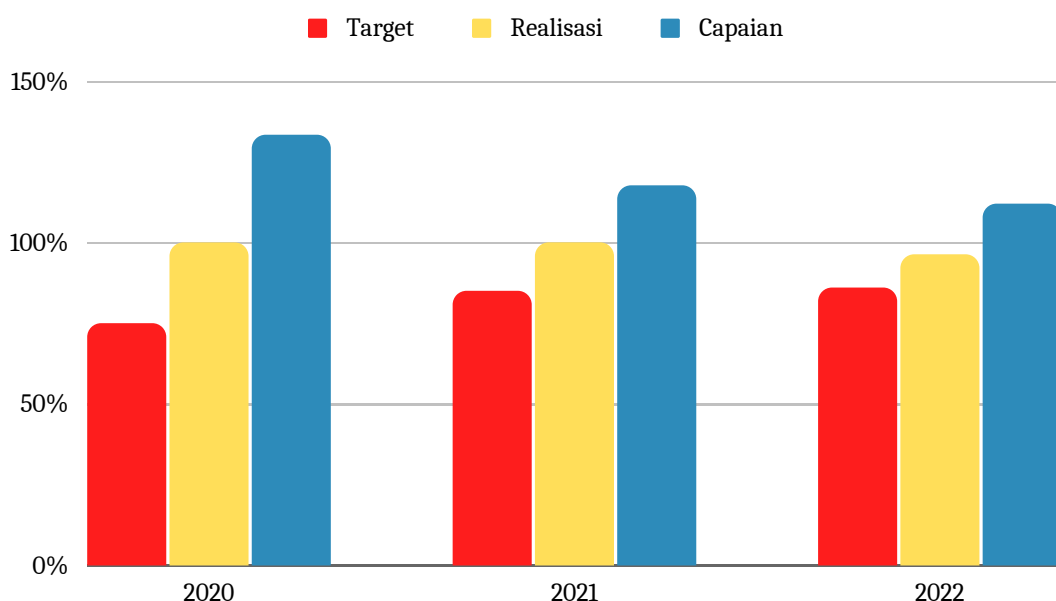
Tabel 21 Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu

Selama tahun 2022 perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diselesaikan sebanyak 81 perkara dan yang telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 78 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96,29%.

Jenis Perkara	Tahun	Perkara yang Diselesaikan	Perkara Diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	2020	31	31	75%	100%	133.33%
	2021	68	65	85%	100%	117.64%
	2022	81	78	86%	96,29%	111,96%

Tabel 22 Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2020-2022

Tabel 22 menunjukkan data tahun 2022, bahwa capaian penyelesaian perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu mencapai **111,96%**.



Grafik 4 Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diputus/diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020-2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2022) persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan. Jika melihat jumlah perkara yang masuk, ada beberapa perkara yang tidak diselesaikan dengan tepat waktu. Dari Grafik dapat dilihat bahwa dari 81 perkara tipikor yang masuk pada tahun 2022 dan hanya 78 perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tebalnya berkas perkara, banyaknya alat bukti, saksi dan/atau ahli yang dihadirkan saat persidangan, serta terlambat melakukan minutasasi.

Namun, dari segi pencapaian target mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 target penyelesaian perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu adalah 85% kemudian ditingkatkan menjadi 86% pada tahun 2022. Realisasi Tahun 2022 sebesar 96,29% sudah memenuhi bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan, antara lain?

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui MIS dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus (Tipikor) telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

5. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 2%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tahun	Perkara diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara diselesaikan dengan Restoratif
2022	NIHIL	NIHIL

Tabel 23 Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pada tabel diatas perkara yang diajukan untuk restoratif adalah tidak ada sehingga jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif nihil.

Indikator Kinerja:

6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 76%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Data perkara Pidana Tahun 2022

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Keterangan
Januari	155	8	147	Untuk tahun 2022 Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan sebanyak 1761 dan yang mengajukan banding sebanyak 86 perkara, yang berarti jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1675 Perkara
Februari	137	4	133	
Maret	167	9	158	
April	162	7	155	
Mei	126	9	117	
Juni	185	12	173	
Juli	115	9	106	
Agustus	161	12	158	
September	139	9	129	
Oktober	130	3	127	
November	177	6	171	
Desember	107	6	101	
Total	1761	86	1675	95.11%

Tabel 24 Data perkara Pidana Tahun 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 95,11 %. Hanya 86 perkara dari total 1761 perkara yang mengajukan banding. Apabila data disajikan dalam triwulan atau pertiga bulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Jan-Maret)	Pidana Biasa	459	436
	Pidana Anak	16	16
II (Apr-Jun)	Pidana Biasa	473	445
	Pidana Anak	24	24

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
III (Jul-Sept)	Pidana Biasa	415	393
	Pidana Anak	17	16
IV (Okt-Des)	Pidana Biasa	414	399
	Pidana Anak	19	18

Tabel 25 Data perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2022

Data perkara Perdata Tahun 2022

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan	Jumlah perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum Banding	Jumlah perkara Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Keterangan
Januari	38	9	29	Untuk Tahun 2022 Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan sebanyak 303 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 68 perkara, yang berarti jumlah perkara gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 235 perkara
Februari	17	2	15	
Maret	24	1	23	
April	24	4	20	
Mei	19	5	14	
Juni	16	6	10	
Juli	25	12	13	
Agustus	31	1	30	
September	36	4	32	
Oktober	20	11	9	
November	24	7	17	
Desember	29	6	23	
Total	303	68	235	77.55%

Tabel 26 Data perkara Perdata tahun 2022

Tidak lebih banyak dari perkara pidana, Jumlah Perkara Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding memiliki 68 perkara. Namun, jika dilihat dari realisasi dan capaian persentasenya, Perkara Gugatan memiliki persentase lebih kecil sebesar 77,55%. Apabila data disajikan dalam triwulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Jan-Maret)	Gugatan	79	67
II (Apr-Jun)	Gugatan	59	44
III (Jul-Sept)	Gugatan	92	75
IV (Okt-Des)	Gugatan	73	49

Tabel 27 Data perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2022

Data perkara Tipikor Tahun 2022

Bulan	Perkara Tipikor yang telah diselesaikan	Jumlah perkara tipikor yang mengajukan upaya hukum banding	Jumlah perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Keterangan
Januari	8	0	8	Untuk tahun 2022 Perkara Tipikor yang diselesaikan sebanyak 81 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 42 perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 39 perkara
Februari	7	4	3	
Maret	4	0	4	
April	3	0	3	
Mei	13	10	3	
Juni	4	4	0	
Juli	10	5	5	
Agustus	4	3	1	
September	7	3	4	
Oktober	7	1	6	
November	11	11	0	
Desember	3	1	2	
Total	81	42	39	48.14%

Tabel 28 Data perkara Tipikor tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diputus sebanyak 81 perkara dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 39 perkara. Berdasarkan data di atas didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 48,14%. Apabila data disajikan dalam triwulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

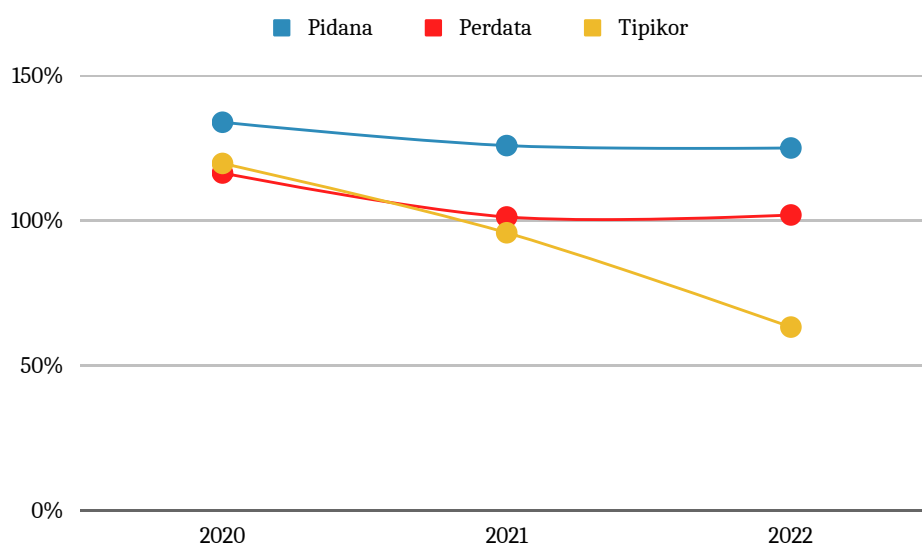
Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
I (Jan-Maret)	Pidana Khusus (Tipikor)	19	15
II (Apr-Jun)		20	6
III (Jul-Sept)		21	10
IV (Okt-Des)		21	8

Tabel 29 Data perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2022

Jika seluruh data di atas dirangkum, maka berikut ini tabel Jumlah Perkara secara keseluruhan yang tidak mengajukan upaya hukum banding beserta persentase realisasi, target dan capaiannya.

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pidana	1946	2047	70%	93.82%	134.02%
	Perdata	208	255	70%	81.56%	116.51%
	Tipikor	26	31	70%	83.87%	119.81%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020						123.44%
2021	Pidana	1631	1996	75%	81.87%	125.97%
	Perdata	225	296	75%	76.01%	101.34%
	Tipikor	41	57	75%	71.92%	95.89%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2021						107.73%
2022	Pidana	1761	1675	76%	95.11%	125.14%
	Perdata	303	235	76%	77.55%	102.03%
	Tipikor	81	39	76%	48.14%	63.34%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022						96.83%

Tabel 30 Perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022



Grafik 5 Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2022) persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Untuk perkara Perdata dan Pidana dari tahun ke tahun mengalami persentase positif. Realisasi dan capaian selalu memenuhi bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Tren ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan sudah puas dengan putusan perkara pidana dan perdata yang diberikan hakim pada tingkat Pertama.

Namun, jika diakumulasi dengan perkara tipikor terlihat penurunan persentase capaian bahkan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menerima jumlah perkara tipikor dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat 81 perkara tipikor yang diselesaikan, namun hanya 39 diantaranya yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Apabila ingin mencapai target, setidaknya 62 perkara dari 81 perkara yang diselesaikan tidak mengajukan upaya hukum banding. Dapat diartikan bahwa para pencari keadilan belum cukup puas dengan putusan perkara tipikor yang diberikan hakim pada tingkat Pertama.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan untuk Perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, antara lain?

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam bertugas melaksanakan Fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Sedangkan, faktor yang mengakibatkan penurunan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan untuk Perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding, antara lain?

- Pencari keadilan belum cukup puas dengan putusan perkara tipikor yang diberikan hakim pada tingkat Pertama.

Indikator Kinerja:

7. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 76%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Keterangan
Januari	155	4	151	Untuk tahun 2022 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 1761 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 42 perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1719 perkara
Februari	137	0	137	
Maret	167	4	163	
April	162	5	157	
Mei	126	2	124	
Juni	185	9	176	
Juli	115	8	107	
Agustus	161	2	159	
September	139	6	133	
Oktober	130	1	129	
November	177	0	177	
Desember	107	1	106	
Total	1761	42	1719	97.61%

Tabel 31 Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 97.61%. Hanya 42 perkara dari total 1761 perkara yang mengajukan banding. Apabila data disajikan dalam triwulan atau pertiga bulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Jan-Maret)	Pidana Biasa	459	451
	Pidana Anak	16	16
II (Apr-Jun)	Pidana Biasa	473	457
	Pidana Anak	24	24
III (Jul-Sept)	Pidana Biasa	415	399
	Pidana Anak	17	16
IV (Okt-Des)	Pidana Biasa	414	412
	Pidana Anak	19	18

Tabel 32 Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 per triwulan

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara PG yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Keterangan
Januari	38	5	33	Untuk tahun 2022 jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan sebanyak 303 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 58 perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 245 perkara
Februari	17	3	14	
Maret	24	5	19	
April	24	9	15	
Mei	19	1	18	
Juni	16	0	16	
Juli	25	3	22	
Agustus	31	8	23	
September	36	6	30	
Oktober	20	7	13	
November	24	4	20	
Desember	29	7	22	
Total	303	58	245	80.85%

Tabel 33 Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Perkara Perdata yang telah diputus sebanyak 303 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 245 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 80,85 %. Apabila data disajikan dalam triwulan atau pertiga bulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Jan-Maret)	Gugatan	79	66
II (Apr-Jun)	Gugatan	59	49
III (Jul-Sept)	Gugatan	92	75
IV (Okt-Des)	Gugatan	73	55

Tabel 34 Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 pertriwulan

Berikutnya, disajikan tabel perkara perdata khusus (PHI) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022.

Bulan	Jumlah Perkara PHI yang diselesaikan	Jumlah perkara PHI yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Keterangan
Januari	17	4	13	Untuk tahun 2022 Jumlah perkara PHI yang diselesaikan sebanyak 194 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 55 perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 139 perkara
Februari	7	5	2	
Maret	14	0	14	
April	41	10	31	
Mei	15	0	15	
Juni	16	3	13	
Juli	2	2	0	
Agustus	5	1	4	
September	19	2	17	
Oktober	22	3	13	
November	15	20	1	
Desember	21	5	16	
Total	194	55	139	71,64%

Tabel 35 Perkara PHI yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkara perdata khusus (PHI) yang telah diputus sebanyak 194 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 139 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 71,64%. Berikutnya, disajikan tabel perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022.

Bulan	Jumlah Perkara Tipikor yang diselesaikan	Jumlah perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Keterangan
Januari	8	2	6	Untuk tahun 2022 perkara tipikor yang diselesaikan sebanyak 81 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 64 perkara
Febuari	7	1	6	
Maret	4	0	4	
April	3	0	3	
Mei	13	3	10	
Juni	4	4	0	
Juli	10	1	9	
Agustus	4	2	2	
September	7	4	3	
Oktober	7	0	7	
November	11	0	11	
Desember	3	0	3	
Total	81	17	64	79.01%

Tabel 36 Perkara Tipikor yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa perkara pidana khusus (Tipikor) yang telah diputus sebanyak 81 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 64 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 79,01%. Apabila data disajikan dalam triwulan atau pertiga bulan, maka akan seperti pada tabel di bawah ini.

Triwulan	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan/diputus	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
I (Jan-Maret)	Pidsus (Tipikor)	19	16
II (Apr-Jun)		20	13
III (Jul-Sept)		21	14
IV (Okt-Des)		21	21

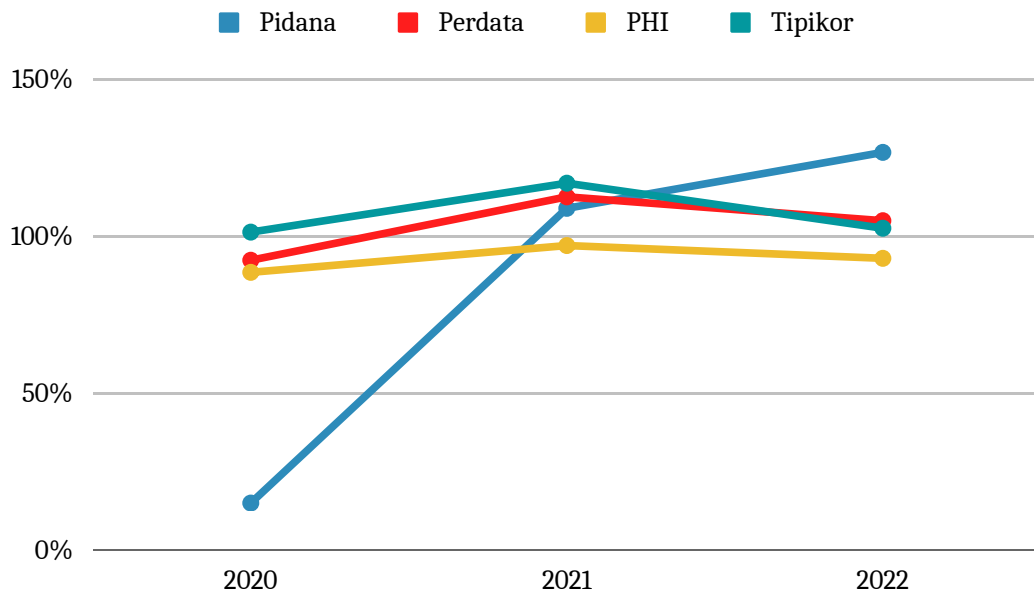
Tabel 37 Perkara Tipikor yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 pertriwulan

Jika seluruh data di atas dirangkum, maka berikut ini tabel Jumlah Perkara secara keseluruhan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi beserta persentase realisasi, target dan capaiannya.

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pidana	22	2074	70%	10.60%	15.14%
	Perdata	165	255	70%	64.70%	92.42%
	PHI	93	150	70%	62%	88.57%
	Tipikor	22	31	70%	70.96%	101.37%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020						74.37%
2021	Pidana	1631	1996	75%	81.87%	108.94%
	Perdata	250	296	75%	84.45%	112.60%
	PHI	295	405	75%	72.83%	97.10%
	Tipikor	50	57	75%	87.71%	116.94%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2021						108.89%
2022	Pidana	1761	1719	76%	97,60%	126,75%
	Perdata	303	245	76%	80,85%	105%
	PHI	194	139	76%	71,64%	93,03%
	Tipikor	81	64	76%	79,01%	102,61%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022						106,84%

Tabel 38 Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022

Tabel 38 menunjukkan data tahun 2022, bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 106,84%, dengan target tahun 2022 sebesar 76% jadi capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 140,57%.



Grafik 6 Perkara yang tidak mengajukan upaya banding tahun 2020- 2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2022) persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selalu melampaui target. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa para pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim pada tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun tingkat Kasasi.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan untuk Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam bertugas melaksanakan Fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama..

Indikator Kinerja:

8. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi yang dinyatakan berhasil	Nomor Perkara PN	Keterangan
Januari	0	0	-	Untuk tahun 2022 jumlah perkara diversi sebanyak 7 perkara, dan semuanya dinyatakan diversi berhasil
Februari	2	2	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg	
Maret	1	1	11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg	
April	1	1	18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg	
Mei	0	0	-	
Juni			30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg 36/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg	
Juli	0	0	-	
Agustus	0	0	-	
September	0	0	-	
Oktober	0	0	-	
November	0	0	-	
Desember	0	0	-	
Total	7	7	7	100%

Tabel 39 Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi tahun 2020- 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Jumlah Perkara diversi tahun 2022 sebanyak 7 perkara dan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil sebanyak 7 perkara, realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan yang diselesaikan secara diversi sebesar 100%.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian diversifikasi antara lain:

- Adanya komitmen Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mematuhi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pengadilan anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik anak, baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator Kinerja:

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan difungsikan sebagai berikut:

Index Kepuasan Pencari Keadilan
--

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang. Survey Index Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada Kejaksaan, Advokat, dan masyarakat umum. Dasar hukum menghitung Index Kepuasan Pencari Keadilan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Skala	T-1 (Jan-Mar)	JR T-1	T-2 (Apr-Jun)	JR T-2	T-3 (Jul-Sep)	JR T-3	T-4 (Okt-Des)	JR T-4	Total SKM Tahun 2022
1-100	91,72	112	95,82	154	99,81	96	88,87	160	94,05%
1-4	3,67		3,82		3,99		3,55		3,75

Tabel 40 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Skala	T-1 (Jan-Mar)	JR T-1	T-2 (Apr-Jun)	JR T-2	T-3 (Jul-Sep)	JR T-3	T-4 (Okt-Des)	JR T-4	Total IPAK Tahun 2022
1-100	91,07	112	94,52	152	100	78	88,54	161	93,53%
1-4	3,64		3,78		4,00		3,54		3,74

Tabel 41 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Keterangan:

T (Triwulan) JR (Jumlah Responden)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target indeks responden puas terhadap layanan peradilan tahun 2022 sebesar **94,05%**, dan realisasi indeks responden puas terhadap persepsi anti korupsi tahun 2022 sebesar **93,53%**. Berikut disajikan tabel capaian SKM dari tahun 2020-2022.

Periode	Jumlah Responden (Orang)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Mutu Pelayanan
Januari - Juni 2020	150	90,33 %	50%	90,41%	180,82%	Sangat baik
Juli - Desember 2020	150	90,50 %				
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020						180,82%
Januari - Juni 2021	121	99,75%	90%	99,68%	110,75%	Sangat baik
Juli - September 2021	109	99,31%				
Oktober-Desember 2021	24	100%				
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021						110,75%
Januari - Maret 2022	112	91,72%	91%	94,05%	103,35%	Sangat baik
April-Juni 2022	154	95,82%				
Juli-September 2022	96	99,81%				
Oktober -Desember 2022	160	88,87%				
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022						103,35%

Tabel 42 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 2020-2022



Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori SANGAT BAIK dengan persentase sebesar 94,05 %. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori "Sangat Baik";
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang berada pada kategori "Sangat Baik";
3. Waktu Penyelesaian pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Palembang pada kategori "Sangat Baik";

Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
4. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
5. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,42%	94,42%
2	Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
4	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,29 %	100%	96,29%
5	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	6%	1.83%	5.36%	3.68%	0.73%	3,06 %	51%
Rata-rata capaian sasaran 2 pada tahun 2022										88,34%

Tabel 43 Sasaran 2

Indikator Kinerja:

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **94.42%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Jumlah Putusan Perkara yang diminutasi/dikirim	Perkara Salinan Putusan Perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Keterangan
Januari	Gugatan	38	34	87	Untuk tahun 2022 jumlah perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim sebanyak 914 Perkara, dan untuk jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu sebanyak 863 Perkara.
	Gugatan Sederhana	28	28		
	Permohonan	27	27		
Februari	Gugatan	17	14	78	
	Gugatan Sederhana	15	13		
	Permohonan	37	37		
Maret	Gugatan	24	22	84	
	Gugatan Sederhana	49	45		
	Permohonan	17	17		
April	Gugatan	24	23	68	
	Gugatan Sederhana	17	15		
	Permohonan	30	30		
Mei	Gugatan	19	15	37	
	Gugatan Sederhana	13	12		
	Permohonan	10	10		
Juni	Gugatan	16	14	55	
	Gugatan Sederhana	19	16		
	Permohonan	25	25		
Juli	Gugatan	25	22	69	
	Gugatan Sederhana	20	18		
	Permohonan	29	29		

Bulan	Perkara	Jumlah Putusan Perkara yang diminutasi/dikirim	Perkara Salinan Putusan Perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Keterangan
Juli	Gugatan	25	22	69	
	Gugatan Sederhana	20	18		
	Permohonan	29	29		
Agustus	Gugatan	32	29	88	
	Gugatan Sederhana	19	17		
	Permohonan	42	42		
September	Gugatan	36	34	70	
	Gugatan Sederhana	19	17		
	Permohonan	19	19		
Oktober	Gugatan	20	15	74	
	Gugatan Sederhana	21	18		
	Permohonan	41	41		
November	Gugatan	26	23	78	
	Gugatan Sederhana	29	25		
	Permohonan	30	30		
Desember	Gugatan	30	26	75	
	Gugatan Sederhana	14	12		
	Permohonan	37	37		
Total Tahun 2022		914		863	94,42%

Tabel 44 Salinan Putusan Perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022

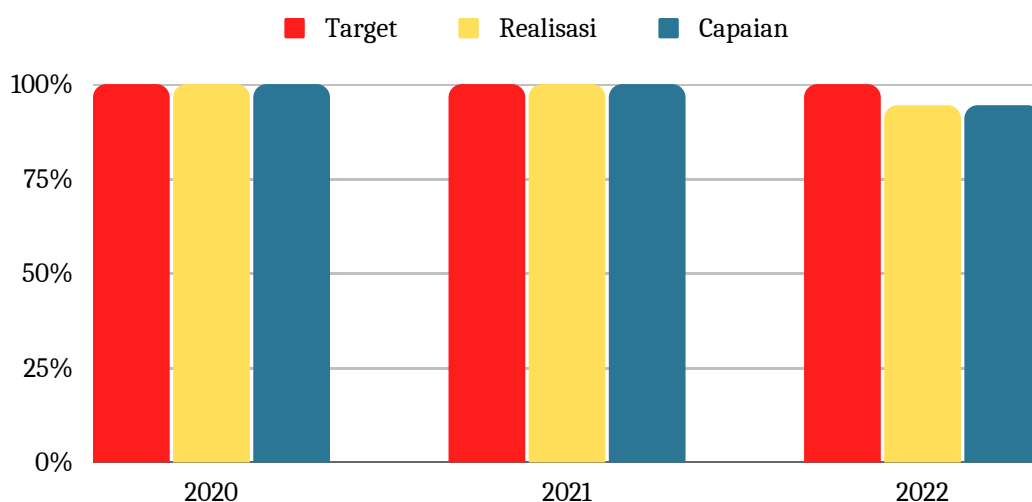
Pada tahun 2022 jumlah perkara perdata yang diminutasi/dikirim sebanyak 914 perkara dan jumlah salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu sebanyak 863 perkara sehingga persentasi salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu yaitu 94,42%.

Jika seluruh data di atas dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah Salinan Putusan Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perdata diminutasi dan dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang diminutasi/ dikirim	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	2020	255	255	100%	100%	100%
	2021	809	809	100%	100%	100%
	2022	863	914	100%	94,42%	94,42%

Tabel 45 Salinan Putusan Perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022

Tabel 45 menunjukkan data tahun 2022, bahwa Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu sebesar 94,42%.



Grafik 7 Salinan Putusan Perkara perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu sejak 2020- 2021 selalu mencapai target dengan realisasi dan capaian 100%. Sedangkan, pada tahun 2022 terdapat 51 Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan yang disampaikan dengan tidak tepat waktu. Hal ini bisa terjadi karena melebihi waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkannya putusan.



Faktor yang mendukung agar Salinan Putusan Perkara Perdata disampaikan ke para pihak dengan tepat waktu, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan dan Surat Dirjen Badilum Nomor:486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui SIPP dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
- SOP Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

2. Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diminutasi/dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

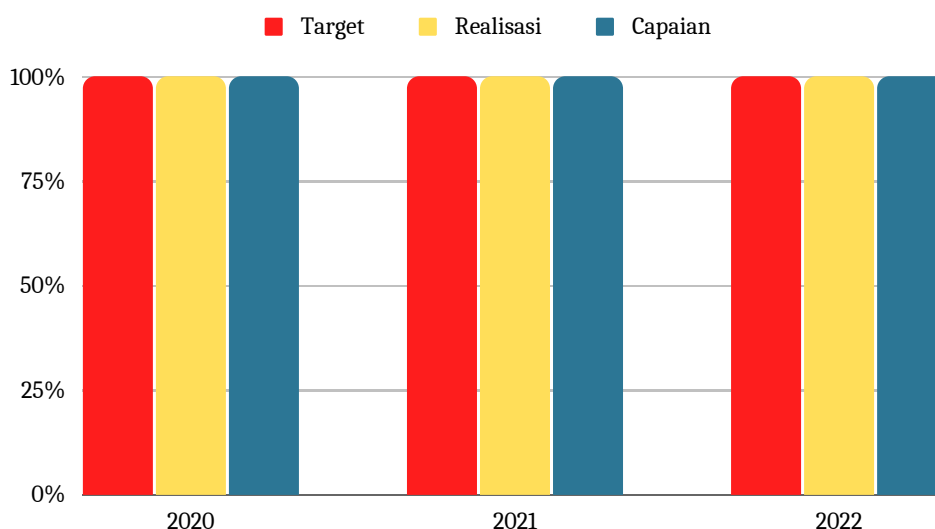
Perkara	Bulan	Jumlah Perkara PHI yang diminutasi/dikirim	Jumlah salinan putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
PHI	Januari	17	17
	Febuari	7	7
	Maret	14	14
	April	41	41
	Mei	15	15
	Juni	16	16
	Juli	2	2
	Agustus	5	5
	September	19	19
	Oktober	22	22
	November	15	15
	Desember	21	21
Jumlah		194	194

Tabel 46 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022

Pada tahun 2022 jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diminutasi / dikirim sebanyak 194 perkara dan semua salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu, sehingga persentasi salinan putusan perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu yaitu 100%. Jika seluruh data di atas dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan diminutasi dan dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Putusan Perkara Yang diminutasi /dikirim	Target	Realisasi	Capaian
Perdata Khusus (PHI)	2020	150	150	100%	100%	100%
	2021	405	405	100%	100%	100%
	2022	194	194	100%	100%	100%

Tabel 47 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022



Grafik 7 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu selalu memenuhi target, selain itu realisasi dan capaiannya selalu 100%.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan untuk salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) disampaikan kepada para pihak tepat waktu, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan dan Surat Dirjen Badilum Nomor:486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui SIPP dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
- SOP Pengiriman salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) disampaikan kepada para pihak tepat waktu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

3. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana yang diminutasi / dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu" pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Perkara	Perkara yang Pidana diminutasi/ dikirim	Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu	Keterangan
Januari	Pidana Biasa	155	155	Untuk tahun 2022 jumlah putusan perkara pidana yang diminutasi/dikirim tahun 2022 sebanyak 1837 Perkara, dan salinan putusan yang diminutasi/dikirim semuanya tepat waktu.
	Pidana Anak	4	4	
	Total	159	159	
Februari	Pidana biasa	137	137	
	Pidana Anak	7	7	
	Total	144	144	
Maret	Pidana biasa	167	167	
	Pidana Anak	5	5	
	Total	172	172	
April	Pidana biasa	162	162	
	Pidana Anak	10	10	
	Total	172	172	
Mei	Pidana Biasa	126	126	
	Pidana Anak	3	3	
	Total	129	129	
Juni	Pidana biasa	185	185	
	Pidana Anak	11	11	
	Total	196	196	
Juli	Pidana Biasa	115	115	
	Pidana Anak	7	7	
	Total	122	122	
Agustus	Pidana biasa	161	161	
	Pidana Anak	2	2	
	Total	163	163	
September	Pidana Biasa	139	139	
	Pidana Anak	8	8	
	Total	147	147	

Bulan	Perkara	Perkara yang Pidana diminutasi/ dikirim	Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu	Keterangan
Total		147	147	
Oktober	Pidana biasa	130	130	
	Pidana Anak	2	2	
Total		132	132	
November	Pidana Biasa	177	177	
	Pidana Anak	9	9	
Total		186	186	
Desember	Pidana biasa	107	107	
	Pidana Anak	8	8	
Total		115	115	
JUMLAH		1837	1837	100%

Tabel 48 Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022

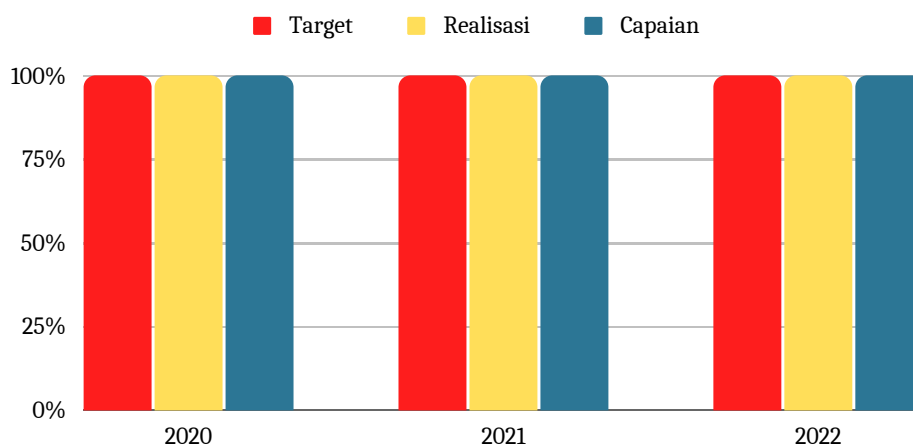
Dari tabel dapat diketahui bahwa Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 1837 putusan dan salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 1837 putusan Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah capaiannya sebesar 100%.

Jika seluruh data di atas dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Diputus	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	2020	2074	2074	100%	100%	100%
	2021	1914	1914	100%	100%	100%
	2022	1837	1837	100%	100%	100%

Tabel 49 Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020- 2022

Tabel 49 menunjukkan data tahun 2022, bahwa Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu mencapai target 100%.



Grafik 8 Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020- 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu selalu memenuhi target, selain itu realisasi dan capaiannya selalu 100%.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 3 (tiga) tahun belakangan untuk salinan putusan perkara pidana disampaikan kepada para pihak tepat waktu, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan Surat Dirjen Badilum Nomor:486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui SIPP dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
- SOP Pengiriman salinan putusan perkara pidana disampaikan kepada para pihak tepat waktu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

4. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi / dikirim, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Perkara	Bulan	Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu	Jumlah salinan putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Keterangan
Pidana Khusus (Tipikor)	Januari	8	8	Jumlah putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang diminutasi/dikirim tahun 2022 sebanyak 81 Perkara
	Febuari	7	7	
	Maret	4	4	
	April	3	3	
	Mei	13	13	

Perkara	Bulan	Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu	Jumlah salinan putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	Keterangan
	Juni	4	1	dan salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu tahun 2022 sebanyak 78 Perkara.
	Juli	10	10	
	Agustus	4	4	
	September	7	7	
	Oktober	7	7	
	November	11	11	
	Desember	3	3	
Total		81	78	96,29%

Tabel 50 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2022

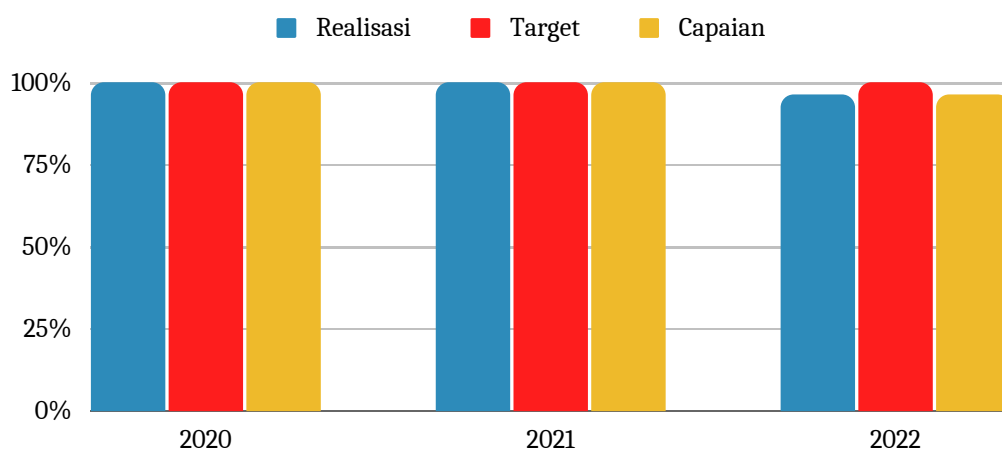
Pada tahun 2022 Jumlah putusan perkara pidana khusus (Tipikor) pada tahun 2022 sebanyak 81 putusan, dan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu sebanyak 78 perkara, Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah capaiannya sebesar 96,29%.

Jika seluruh data di atas dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Diputus	Realisasi	Target	Capaian
Pidana Khusus (Tipikor)	2020	31	31	100%	100%	100%
	2021	69	69	100%	100%	100%
	2022	81	78	96,29%	100%	96,29%

Tabel 51 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022

Tabel 3.40 menunjukkan data tahun 2022, bahwa Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu mencapai target 96,29 %.



Grafik 9 Salinan Putusan Perkara PHI yang diminutasi dan dikirim tepat waktu tahun 2020-2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu sejak 2020- 2021 selalu mencapai target dengan realisasi dan capaian 100%. Sedangkan, pada tahun 2022 terdapat 3 Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan yang disampaikan dengan tidak tepat waktu. Hal ini bisa terjadi karena melebihi waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkannya putusan.



Faktor yang mendukung agar Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) disampaikan ke para pihak dengan tepat waktu, antara lain:

- Adanya komitmen bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan Surat Dirjen Badilum Nomor:486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui SIPP dan monev langsung yang diadakan setiap bulan dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
- SOP Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kinerja:

5. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 6%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan mediasi	Jumlah mediasi yang berhasil (akta damai)	Keterangan
Januari	23	1	Untuk tahun 2022 jumlah perkara yang diajukan mediasi sebanyak 294 perkara, dan yang berhadil damai sebanyak 9 perkara
Febuari	19	0	
Maret	19	1	
April	16	0	
Mei	20	2	
Juni	29	0	

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan mediasi	Jumlah mediasi yang berhasil (akta damai)	Keterangan
Juli	21	1	
Agustus	27	2	
September	32	0	
Oktober	27	0	
November	33	1	
Desember	22	1	
Total	294	9	

Tabel 52 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022

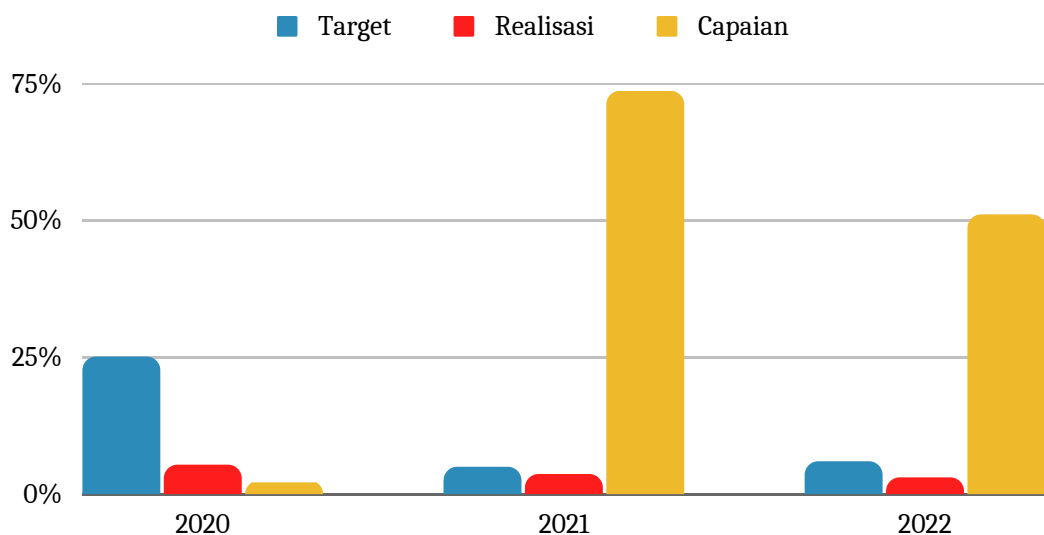
Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 294 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 9 perkara, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 3,06 %.

Jika seluruh data di atas dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi Berhasil	Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	8	149	25%	5.36%	2.14%
2021	6	163	5%	3.68%	73,60%
2022	9	294	6%	3.06%	51,00%

Tabel 53 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2022

Tabel 53 menunjukkan data tahun 2022, bahwa capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi mencapai target sebesar 51,00%.



Grafik 10 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Terjadi penurunan drastis pada target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 dari 25% menjadi 6% pada tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 43,71%, dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi sebanyak 294 perkara, dan sebanyak 9 perkara yang berhasil di mediasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan, maka mediator baik dari hakim dan mediator non hakim bisa lebih maksimal agar perkara dapat diselesaikan secara mediasi. Perkara yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.



Faktor yang mendukung agar penyelesaian perkara melalui mediasi dapat melampaui target, antara lain:

- Adanya komitmen Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

Sasaran 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu: **Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).**

Adapun pencapaian terget kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” untuk inikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian sasaran 3 pada tahun 2022										100%

Tabel 54 Sasaran 3

Indikator Kinerja:

1. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%, Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Jan	19	19
Feb	26	26
Mar	29	29
Apr	15	15
Mei	21	21
Jun	39	39
Jul	21	21
Agst	15	15
Sep	18	18
Okt	24	24
Nov	16	16
Des	12	12
Total	255	255

Tabel 55 Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum

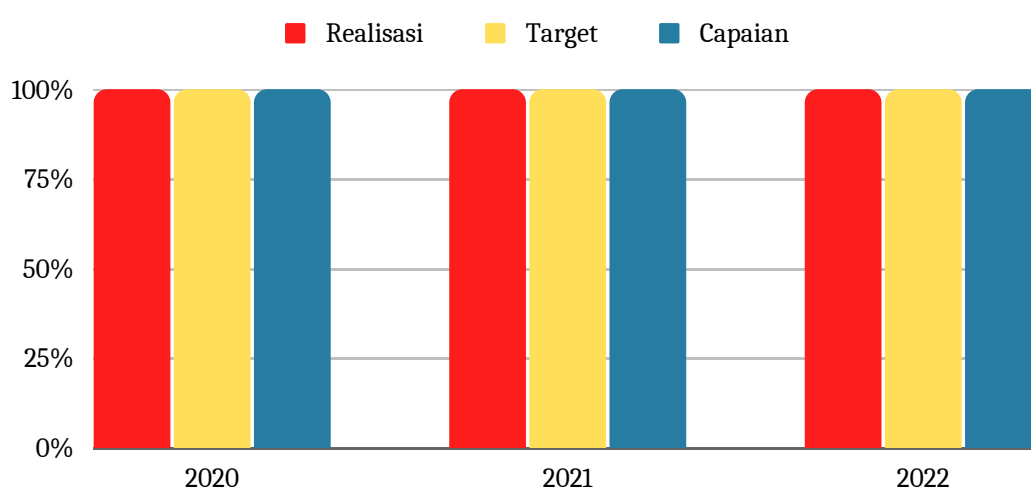
Pada tahun 2022 Posbakum Pengadilan Negeri Palembang membantu masyarakat yang menggunakan layanan posbakum dan mencatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum, adapun jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum tahun 2022 sebanyak 255 orang dan semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum.

Jika seluruh data dirangkum dari tahun 2020-2022, maka berikut ini tabel Jumlah capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Realisasi	Target	Capaian
2020	263	263	100%	100%	100%
2021	284	284	100%	100%	100%
2022	255	255	100%	100%	100%

Tabel 56 Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum 2020-2022

Tabel 56 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2022.



Grafik 11 Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum 2020-2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan analisa sebagai berikut:

Pada tahun 2022 target kinerja sebesar 100%, dan realisasi kinerja sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja dapat menncapai sebesar 100%, dimana semua pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Sasaran 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu: **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).**

Adapun pencapaian terget kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)			Capaian (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	100%	70%	124,39%	100%	100%	65%	3%	100%	191,36%
Rata-rata capaian sasaran 4 pada tahun 2022										191,36%

Tabel 57 Sasaran 4

Indikator Kinerja:

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan ditindaklanjuti (eksekusi), difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 70%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Bulan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Keterangan
Januari	5	1	Untuk tahun 2022 jumlah permohonan eksekusi sebanyak 41 perkara dan jumlah eksekusi yang selesai dilaksanakan sebanyak 51 perkara
Februari	7	2	
Maret	2	0	
April	1	0	
Mei	0	11	
Juni	4	10	
Juli	8	4	
Agustus	2	8	
September	3	0	
Oktober	1	0	
November	6	14	
Desember	2	1	
Total	41	51	124,39%

Tabel 58 Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

DATA PERMOHONAN EKSEKUSI YANG TELAH SELESAI TAHUN 2022

NO	NOMOR EKSEKUSI	NAMA PARA PIHAK	KETERANGAN
1	10/Pdt.RL.Eks/2020/PN.Plg	DANY DESRANDY.SLAWANIr.SRINITA RAFIANTI	12 Januari 2022 [Eksekusi]
2	16/Pdt.Eks/2021/PN PlgJo.No.5/Pdt.GS/2021/PN Plg	EDYLAWANPOLMA SIHOMBING	10 Februari 2022[Eksekusi]
3	5/Pdt.Eks/2020/PN Plgjo. No.37/Pdt.G/2019/PN Plg	PT.TRIPRIMA MULTIFINANCELAWANPUJI ASTUTI, SE	21 Februari 2022[Cabut]
4	16/Pdt.HT/Eks/2015/PN.Plgjo.No.5 /Pdt.GS/2021/PN Plg	PT.Bank Permata TbkLAWANPT.POLY ARGOMANDIRI.DKK	13 Mei 2022[Cabut]
5	24/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg	PT.Bank Buana Indonesia TbkLAWANTRISNAWATI TEJADARMA	12 Mei 2022[Cabut]
7	36/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANTRI SUWARNO	25 Mei 2022[Cabut]

NO	NOMOR EKSEKUSI	NAMA PARA PIHAK	KETERANGAN
8	28/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANCRISTIANA APRILYANI	25 Mei 2022[Cabut]
9	19/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANADELINA SYAFITRI.DKK	25 Mei 2022[Cabut]
10	13/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANEDY YUSUF.DKK	25 Mei 2022[Cabut]
11	33/Pdt.HT/Eks/2011/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANHARUN AL RASYID	25 Mei 2022[Cabut]
12	27/Pdt.HT/Eks/2011/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANAHMAD SALBILAH	25 Mei 2022[Cabut]
13	22/Pdt.HT/Eks/2015/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANKIM LIONG	25 Mei 2022[Cabut]
14	30/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.Bank SumsselLAWANHj.LISNAWATY AMIN	25 Mei 2022[Cabut]
15	15/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANM.SUHINDRA SULAIMAN	8 Juni 2022[Cabut]
16	01/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANTONI WIFANI.DK	8 Juni 2022[Cabut]
17	19/Pdt.HT/Eks/2013/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANKEMAS MUHAMMA ZAMEN	8 Juni 2022[Cabut]
18	23/Pdt.HT/Eks/2014/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANSELLY HERAWATI	8 Juni 2022[Cabut]
19	2/Pdt.HT/Eks/2017/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANRONALD LESLY.DKK	8 Juni 2022[Cabut]
20	1/Pdt.HT/Eks/2006/PN.Plg	PT.Bank Bukopin Cab.PalembangLAWANKoperasi Serba Usaha Tritura.dk	8 Juni 2022[Cabut]
21	16/Pdt.HT/Eks/2014/PN.Plg	PT.Bank Panin Tbk Cab.PalembangLAWANZAKARIA.Z	8 Juni 2022[Cabut]
22	4/Pdt.Eks/2018/PN.PlgJo.No.94/Pd t.G/2016/PN.Plg	NOVIYANTI BIN MARAMISLAWANYOKE NORITA	8 Juni 2022[Cabut]
23	18/Pdt.RL/Eks/2021/PN.Plg	FERDINAN LIAUWLAWANRANTI SARI PRATIWI	8 Juni 2022[Cabut]
24	6 /Pdt.Eks/2020/PN Plg jo. No.161/Pdt.G/2013/PN.Plg	Bony Halim alias Liem IeBohLAWANHusin Halim.dkk	14 Juni 2022[Eksekusi]
25	11/Pdt.Eks/2019/PN.PlgJo.No.18/Pd t.G/2017/PN.Plg	NANUNGLAWANMUHTAR DJAMACH, SH	5 Juli 2022[Cabut]
26	17/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.56/Pdt.G/2019/PN Plg	Drs Amir Syarif selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Ikhlas Dwikora II PalembangLAWANAgustina Novita Sarie,SH	18 Juli 2022[Eksekusi]

NO	NOMOR EKSEKUSI	NAMA PARA PIHAK	KETERANGAN
27	22/Pdt.RL/Eks/2021/PN Plg	HAN PINGLAWANINGGRIANI	20 Juli 2022[Eksekusi]
28	2/Pdt.Eks/2022/PN Plg jo.No.13/Pdt.G/2019/PN.Plg	SUGIANTO AZISLAWANNAZARUDDIN Bin JAMALUDIN	28 Juli 2022[Eksekusi]
29	12/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.16/Pdt.GS/2021/PN Plg	RAMZUL IKHLASH, S.Pd.,M.Pd BINTI K.H.ZEN SYUKRILAWANPT BANK SUMSEL BABEL	4 Agustus 2022[Eksekusi]
30	02/Pdt.Eks/Eks/2015/PN.PlgJo.No .34/Pdt.G/2010/PN.PLG	THAMSIL AWALUDIN dan A.YANIKEPALA KANTOR KPKNL PALEMBANG.DKK	4 Agustus 2022[Eksekusi]
31	09/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.BANK PUNDI INDONESIA TBK PALEMBANGLAWANHENDRIK HANAFI	23 Agustus 2022[Cabut]
32	22/Pdt.HT/Eks/2014/PN.Plg	PT.BANK PUNDI INDONESIA TBK PALEMBANGLAWANRASYID.DK	23 Agustus 2022[Cabut]
33	21/Pdt.HT/Eks/2015/PN.Plg	PT.BANK PUNDI INDONESIA TBK PALEMBANGLAWANTEFICK ZULFIKAR.DK	23 Agustus 2022[Cabut]
34	27/Pdt.Eks/2015/PN.Plg	PEMERINTAH KOTA PALEMBANGLAWANCINTA DINATA.DK	23 Agustus 2022[Cabut]
35	29/Pdt.Eks/2015/PN.Plg	PEMERINTAH KOTA PALEMBANGLAWANSAHFERI NURDIN.DK	23 Agustus 2022[Cabut]
36	30/Pdt.Eks/2015/PN.Plg	PEMERINTAH KOTA PALEMBANGLAWANSAHFERI NURDIN.DK	23 Agustus 2022[Cabut]
37	13/Pdt.Eks/2021/PN.Plgjo.No.183/P dt.G/2017/PN Plg	KELIWON IWARISOLAWANSRI RAHAYU	8 November 2022[Eksekusi]
38	3/Pdt.HT/Eks/2008/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANRUSLI DJUMIN	30 November 2022[Cabut]
39	4/Pdt.HT/Eks/2008/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANAHMAD ARFAI.AZ	30 November 2022[Cabut]
40	5/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANSURYADI TENGGONO.DKK	30 November 2022[Cabut]
41	34/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg	PT.BUKOPIN CAB. PLGLAWANARMANSYAH, SE	30 November 2022[Cabut]
42	37/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANFUAD HARUN	30 November 2022[Cabut]
43	38/Pdt.HT/Eks/2009/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANMUHAMMAD TAUFIK MALIAN,SE	30 November 2022[Cabut]
44	27/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANMETTA FRANSISCA	30 November 2022[Cabut]
45	28/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANFARIDA MITA	30 November 2022[Cabut]

NO	NOMOR EKSEKUSI	NAMA PARA PIHAK	KETERANGAN
46	29/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWAN GUNAWAN	30 November 2022[Cabut]
47	30/Pdt.HT/Eks/2012/PN.Plg	PT.BPR SUKASADA PLGLAWANROSMAINI.DKK	30 November 2022[Cabut]
48	1/Pdt.Eks/2018/PN.PlgJo.No.8/Pdt. GS/2017/PN Plg	TONI KURNIAWANLAWANSANI	30 November 2022[Cabut]
49	2/Pdt.Eks/2018/PN.PlgJo.No.19/Pd t.GS/2017/PN Plg	SETIADI TANTOLAWANANDI WIJAYA	30 November 2022[Cabut]
50	10/Pdt.Eks/2018/PN.PlgJo.No.71/P dt.G/2016/PN. Plg	1.HANAFIAH DAN 2.MARGONOLAWANSYAHRI	30 November 2022[Cabut]
51	9/Pen.Pdt.G/Eks/1995/PN Plg jo.No 28/Pts.Pdt.G/1991/PN Plg	KOKO GUNAWAN THAMRIN LAWAN Ny.MARTINA TOTO KASIHAN SAIDINA OEMAR	8 Desember 2022 [Eksekusi]

Tabel 59 Data Permohonan Eksekusi yang telah selesai tahun 2022

Pada tahun 2022 jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 51 perkara dan jumlah permohonan eksekusi sebanyak 41 perkara maka persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) sebesar 124,39 % dari target sebesar 65% maka nilai capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti sebesar 191,36%.

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang selesai ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2020	39	39	100%	100%	100%
2021	14	20	70%	65%	107.69%
2022	41	51	124,39%	65%	191,36%

Tabel 60 Data Permohonan Eksekusi yang telah selesai tahun 2020-2022



Faktor Penunjang Keberhasilan Pencapaian Target selama 3 (tiga) tahun ke belakang, antara lain:

1. Komitmen bersama seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Palembang dalam meningkatkan Kinerja dan Pelayanan;
2. SOP dan Standar Pelayanan yang dilaksanakan dengan sebaik- sebaiknya;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung secara rutin yang di monev dalam rapat secara berjenjang dan rapat bulanan;
4. Peran pimpinan memberikan motivasi dan contoh dalam mencapai target kinerja sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah **Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.**

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah:

- a. Penyelenggaraan layanan dukung manajemen pengadilan, yang terdiri dari:
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - Pelayanan Umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.
Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah:
 - a. Layanan Sarana dan Prasarana internal, yang terdiri dari:
 - Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bading tepat waktu.

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang terdiri dari: DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palembang Tahun Anggaran 2022, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi(RP)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	15,714,760,000	14,892,936,705	94,77%
2	Belanja Barang	2,851,280,000	2,728,207,302	95,68%
3	Belanja Modal	502.000.000	500.604.000	99,72%

Tabel 61 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

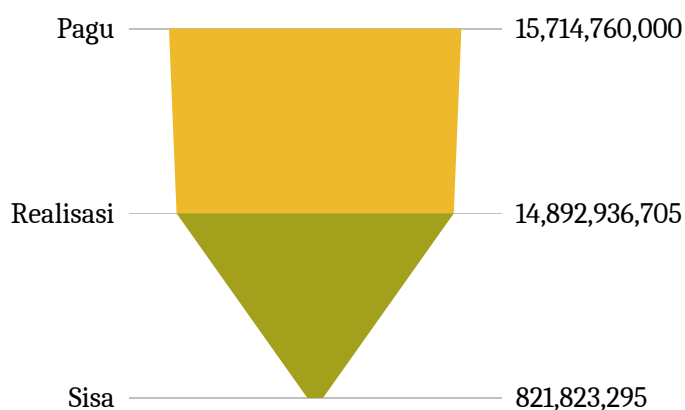
BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan honorarium. Honorarium berkaitan dengan belanja modal dan tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun ini terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2022 dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 94,77% dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Gaji Pokok PNS	4,813,094,000	4,495,321,580	317,772,420	93,40
2	Pembulatan Gaji PNS	70,000	57,722	12,278	82,46
3	Tunj. Suami/Istri PNS	405.054.000	377.824.040	27.229.960	93,28
4	Tunj. Anak PNS	117.132.000	109.050.636	8.081.364	93,10
5	Tunj. Struktural PNS	69.375.000	64.750.000	4.625.000	93,33
6	Tunj. Fungsional PNS	6.485.650.000	6.112.185.000	373.465.000	94,24
7	Tunj. PPh PNS	995.925.000	938.515.547	57.409.453	94,24
8	Tunj. Beras PNS	254.000.000	237.465.180	16.534.820	93,49
9	Tunj. Uang Makan PNS	710.000.000	696.862.000	13.138.000	98,15
10	Tunj. Umum PNS	39.010.000	35.455.000	3.555.000	90,89
11	Tunj. Hakim Ad Hoc	1.825.450.000	1.825.450.000	0	100,00
Jumlah		15.714.760.000	14.892.936.705	821.823.295	94,77

Tabel 62 Belanja Pegawai

Belanja pegawai selama tahun anggaran 2022, apabila digambarkan ke dalam grafik akan menjadi sebagai berikut:



Grafik 12 Belanja Pegawai

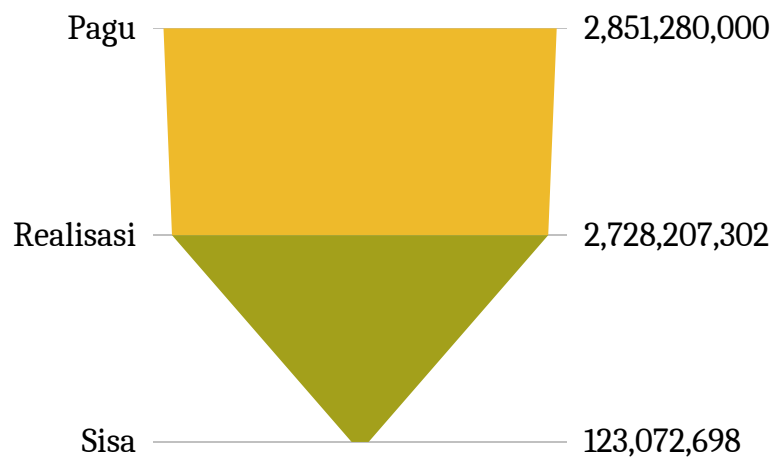
BELANJA BARANG

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap sebesar 95,68% dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	670.208.000	659.335.343	10.872.657	98,38
2	Belanja Barang Operasional Lainnya	64.049.000	58.895.315	5.153.685	91,95
3	Belanja Persd. Barang Konsumsi	191.280.000	185.545.166	5.734.834	97,00
4	Belanja Langganan Internet	234.000.000	230.856.534	3.143.466	98,66
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	34.003.000	31.724.650	2.278.350	93,30
6	Belanja Langganan Listrik	372.821.000	372.807.453	13.547	100,00
7	Belanja Langganan Telepon	12.000.000	6.519.913	5.480.087	54,33
8	Belanja Langganan Air	36.000.000	23.895.470	12.104.530	66,38
9	Belanja Sewa Langganan hosting, domain	5.000.000	5.000.000	0	100,00
10	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	418.760.000	412.162.004	6.597.996	98,42
11	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58.650.000	58.388.000	262.000	99,55
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	281.459.000	267.175.795	14.283.205	94,93
13	Belanja Pakaian Dinas	52.840.000	52.714.000	126.000	99,76
14	Honor Pengelola Keuangan	52.080.000	52.080.000	0	100,00
15	Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi & Bahan Pelantikan)	4.500.000	705.000	3.795.000	15,67
16	Belanja Jasa Lainnya (Jasa Rohaniawan)	350.000	350.000	0	100,00
17	Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi & Bahan Rapat)	15.300.000	12.559.500	2.740.500	82,09
18	Belanja Jasa (Tes Rapid/Swab)	400.000	-	400.000	0,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.900.000	16.401.691	2.498.309	86,78
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000	-	800.000	0,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Konsultasi KPPN/DJPBN/KPKNL)	600.000	450.000	150.000	75,00
22	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID19	19.500.000	17.355.768	2.144.232	89,00
23	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi COVID19	20.000.000	15.065.700	4.934.300	75,33
24	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID19 (Disinfektan)	500.000	-	500.000	0,00
25	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	287.280.000	248.220.000	39.060.000	86,40
Jumlah		2.851.280.000	2.728.207.302	123.072.698	95,68

Tabel 63 Belanja Barang

Belanja Barang selama tahun anggaran 2022, apabila digambarkan ke dalam grafik akan menjadi sebagai berikut:



Grafik 13 Belanja Barang

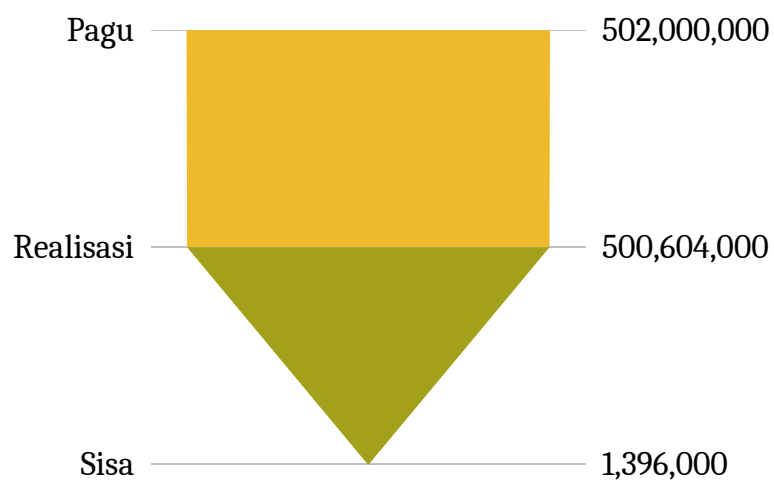
BELANJA MODAL

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja Modal yang telah terserap sebesar 99,72% dengan rician belanja sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (%)	Realisasi (%)	Sisa (%)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-PC Kepaniteraan & Printer	361.000.000	359.654.000	1.346.000	99,63
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Meja,Kursi,Whiteboard, AC & Kursi	141.000.000	140.950.000	50.000	99,96
Jumlah		502.000.000	500.604.000	1.396.000	99,72

Tabel 64 Belanja Modal

Belanja Modal selama tahun anggaran 2022, apabila digambarkan ke dalam grafik akan menjadi sebagai berikut:



Grafik 14 Belanja Modal

Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

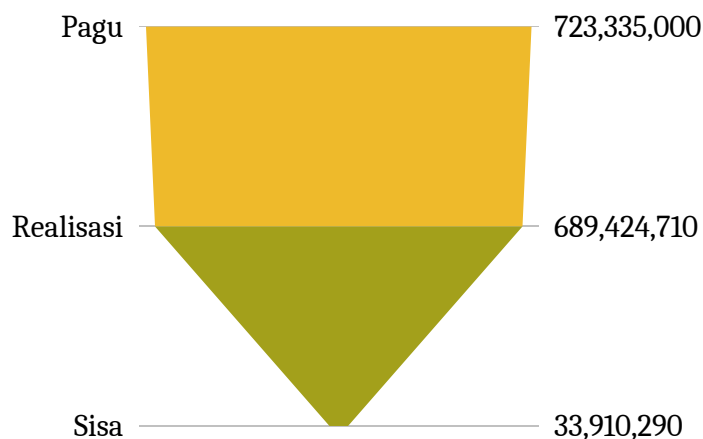
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sudah terserap sebesar 95,31%.

No	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Percepatan Penyelesaian Perkara				
	Rapat Percepatan Penyelesaian Perkara	10,000,000	8,194,000	1,806,000	81,94
2	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	23.852.000	22.360.000	1.492.000	93,74
	Alat Tulis Kantor	153.028.000	152.757.400	270.600	99,82
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	68.250.000	68.040.000	210.000	99,69
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpjngan	100.000	0	100.000	-
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpjngan	68.250.000	68.250.000	-	100,00
	Konsumsi Terdakwa & Pengaman	420.000	0	420.000	-
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	3.900.000	3.666.020	233.980	94,00
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	68.250.000	68.250.000	-	100,00
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	16.000.000	13.801.000	2.199.000	86,26
	Pengiriman Salinan Putusan	287.000	0	287.000	-
	Pemberitahuan Banding & Putusan	42.910.000	38.570.000	4.340.000	89,89
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	8.000.000	7.978.800	21.200	99,74
	Pemberitahuan Kasasi PK & Putusan	32.620.000	30.100.000	2.520.000	92,27
3	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	3.780.000	3.774.000	6.000	99,84
	Alat Tulis Kantor	24.948.000	24.672.000	276.000	98,89
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	2.310.000	1.330.000	980.000	57,58
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpjngan	330.000	307.120	22.880	93,07
	Pengiriman Surat Penahanan & Perpjngan	225.000	-	225.000	0,00
	Konsumsi Terdakwa & Pengaman	8.700.000	6.039.200	2.660.800	69,42
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	2.790.000	2.623.160	166.840	94,02
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	125.000	-	125.000	0,00

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
3	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	22.680.000	22.593.350	86.650	99,62
	Pengiriman Salinan Putusan	281.000	75.600	205.400	26,90
	Pemberitahuan Banding & Putusan	24.640.000	20.930.000	3.710.000	84,94
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	11.524.000	8.635.560	2.888.440	74,94
	Pemberitahuan Kasasi & PK	11.900.000	9.940.000	1.960.000	83,53
4	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama				
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	3.025.000	2.540.000	485.000	83,97
	Alat Tulis Kantor	6.375.000	6.358.000	17.000	99,73
	Pengiriman Pemberitahuan / Panggilan	39.200.000	38.920.000	280.000	99,29
	Konsumsi Pengamanan	150.000	-	150.000	0,00
	Penggandaan & Penjilidan Berkas	3.025.000	2.100.000	925.000	69,42
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	1.260.000	420.100	839.900	33,34
	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	7.000.000	6.930.000	70.000	99,00
	Pengiriman Berkas Kasasi & PK	1.350.000	844.400	505.600	62,55
	Pemberitahuan Kasasi & PK	17.500.000	15.470.000	2.030.000	88,40
	Konsumsi & ATK	1.100.000	300.000	800.000	27,27
	Eksekusi Putusan Pengadilan	9.250.000	8.655.000	595.000	93,57
5	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100,00
Jumlah		723.335.000	689.424.710	33.910.290	95,31

Tabel 65 Belanja Barang DIPA 03

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum selama tahun anggaran 2022, apabila digambarkan ke dalam grafik akan menjadi sebagai berikut:



Grafik 15 Belanja Barang DIPA 03

D. MONITORING DAN EVALUASI

Agar realisasi dan capaian kinerja dapat semakin baik, maka sangat diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan cara :

- Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI dengan link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>



Gambar 7 Tampilan Aplikasi Komdanas

Realisasi di dapatkan dengan memasukkan data input dan output yang terdapat dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang setiap bulannya dalam aplikasi Komdanas.

- Melaksanakan rapat bulanan untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah di supervisi dan dilaksanakan pembahasan-pembahasan, sesuai dengan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Adapun perbaikan dari hasil evaluasi tersebut adalah :

A. Perencanaan Kinerja

- Renstra Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program
- Target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas).

- Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas)

B. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 telah ditetapkan dan menggambarkan kualitas kinerja sesuai dengan IKU yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas). IKU telah digunakan dalam Renstra, RKT dan PKT.

C. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk empat Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator Kinerjanya.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah menyajikan data bulanan perkara pidana dan perdata dan data pembandingnya tahun lalu. Data pembanding realisasi kinerja selama tiga tahun (2020-2022), realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 dan 2020 seluruh Indikator Kinerja.

D. Evaluasi Internal

- Evaluasi internal dilaksanakan dengan menggunakan Ceklist kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengisian realisasi masing-masing IKU pada e-SAKIP setiap bulannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa Kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. REKOMENDASI

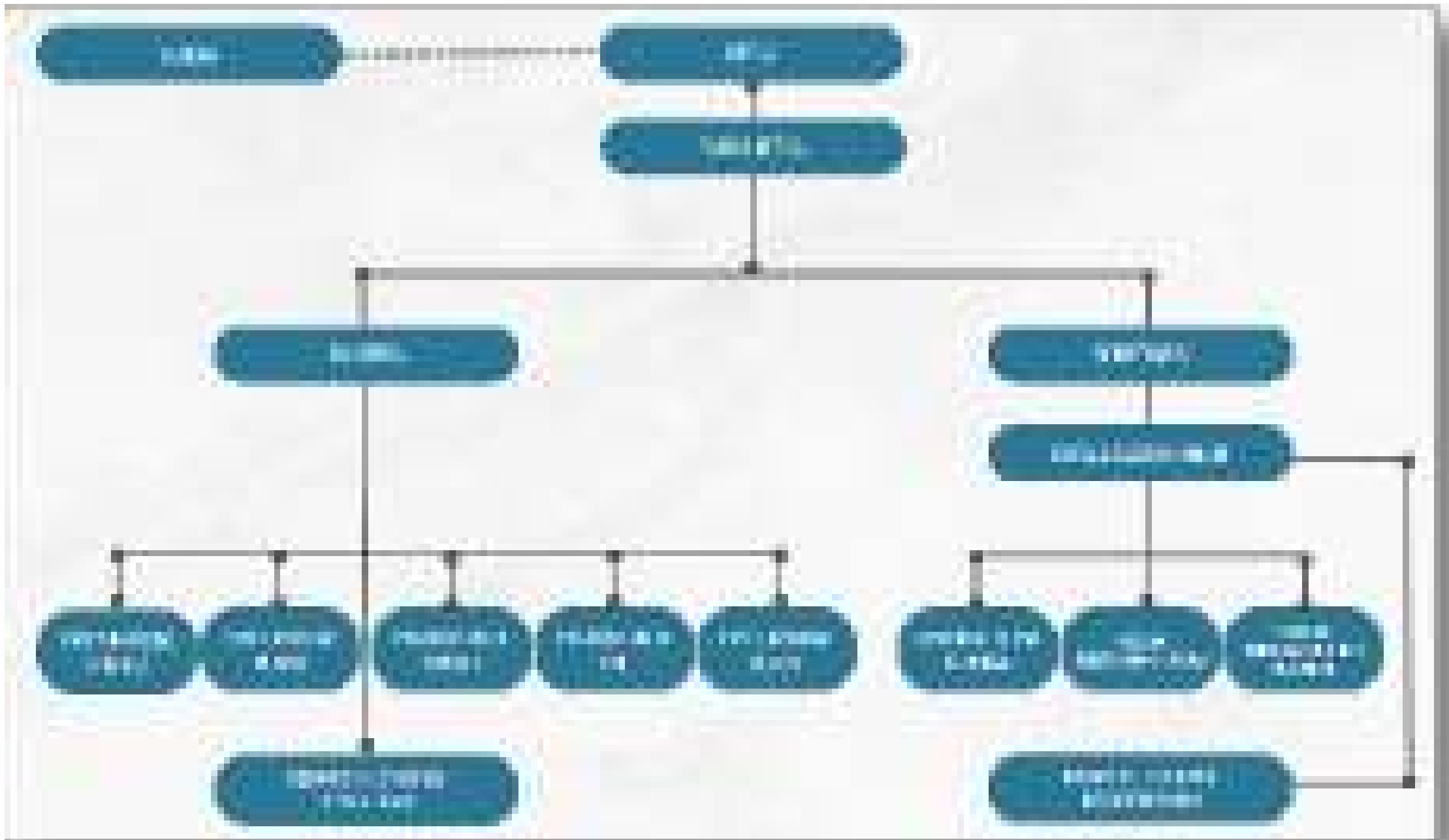
Untuk mengatasi kendala-kendal adalah pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus maka diperlukan:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara dan Tim penyusunan laporan melibatkan kepaniteraan dan kesekretariatan supaya data yang disajikan akurat dan alat evaluasi kinerja.
2. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan keluar dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dan tidak diimbangi dengan mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (penambahan daya listrik, perangkat IT dan alat pengolah data dan mebelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.



LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus



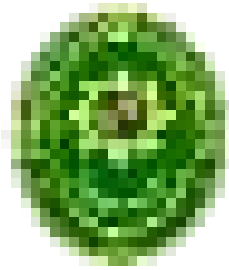


PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

2023

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**REVIU
INDIKATOR
KINERJA UTAMA**

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
NOMOR: W6-U1/08/KP.04.6/I/2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

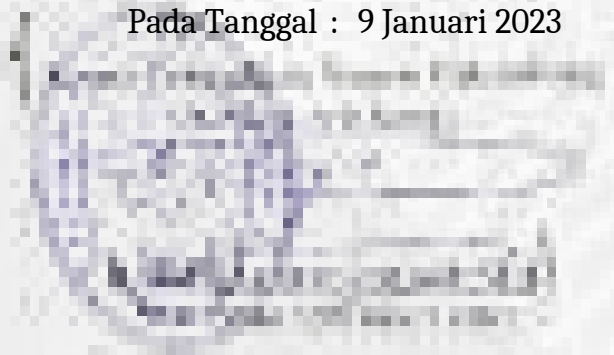
- Menimbang : a. Bahwa perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang mengingat adanya perubahan kebijakan, strategis dan lingkungan strategis serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
- : b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035 perlu ditetapkan IKU pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- : 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- : 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- : 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- : 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**
- PERTAMA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- KEDUA : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sesuai dengan perubahan kebijakan strategis dan lingkungan strategis serta identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 9 Januari 2023



Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor: 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidanan anak yang diajukan diversifikasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus lebih besar atau sama dengan 80 (≥ 80) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

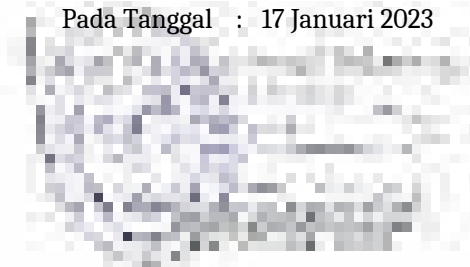
No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Bekekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 17 Januari 2023



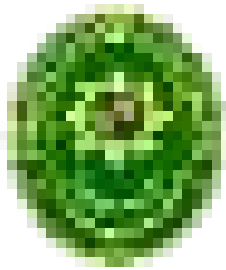


PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



REVIU
PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2022

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id



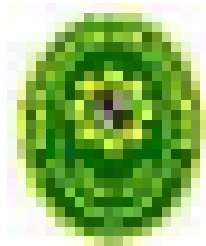
**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

REVIU
PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2022

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. W6.U1/58/OT.01.1/X/2022



Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif dan efisien antara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Nama: **PERJANJIAN KINERJA**
Tahun: **(Rencana Pelaksanaan Kerja Tahun 2022)**

Menyebutkan PERJANJIAN KINERJA

Nama: **PERJANJIAN KINERJA**
Tahun: **(Rencana Pelaksanaan Kerja Tahun 2022)**

Menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA adalah dokumen yang berisi tentang rencana kerja dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2022. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan.

Menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA adalah dokumen yang berisi tentang rencana kerja dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2022. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan.

Menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PERJANJIAN KINERJA

Menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PERJANJIAN KINERJA

Menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. W6.U1/58/OT.01.1/X/2022

No	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana	Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
2	Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Pemeliharaan Fasilitas	Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
3	Meningkatkan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana	Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%
		Menyusun Rencana Pemeliharaan yang Mendukung Fasilitas Baru	100%
4	Meningkatkan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana	Menyusun Rencana Pemeliharaan Rutin dan Insidental	100%

Figura

Figura

1. Penelitian, Pelaksanaan dan Pengabdian Masyarakat	Rp	11.200.000,00
2. Penyusunan Laporan dan Penyusunan Administrasi	Rp	1.000.000,00
3. Keperluan Lain-lain (Kertas, Pengiriman, dll)	Rp	100.000,00

PIHAK KEDUA



Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

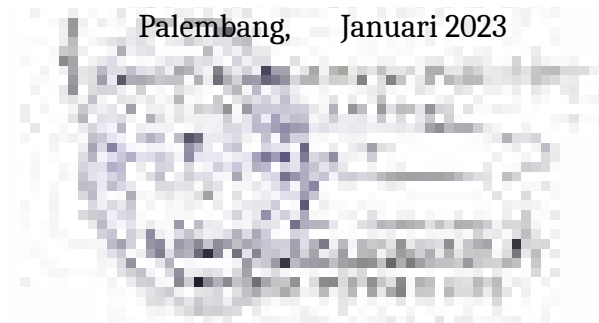
Instansi	Pengadilan Negeri Palembang
Visi	Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	75	85	86	87	88
2		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
3		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
4		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	88		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	75	85	86	87	88
5		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	0	2	2	2

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	75	76	77	78
7		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	75	76	77	78
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20	5	5	6	6
9		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50	90	91	92	93
10	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11		Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
12		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

No	Kinerja Utama		Target Jangka Menengah (5 Tahun) (%)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
13		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
14		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	5	6	7	7
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100	100	100
16	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	70	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	65	65	70	70

Palembang, Januari 2023





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI LUAR NEGERI
JAKARTA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR
DI BUKING BEKASI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Pengadilan Negeri Palembang



Pengadilan Negeri Palembang

Jl. Khatib Sulaiman No. 103-106

Tel. (0711) 915005 - Fax. (0711) 915006 - 300310

84200-801 - Sumatera Selatan 30132

email: pnp@pnptgpnptn.go.id

REKAMEN KEMAHIRAN TULISAN & BAHASA LAIN 2020
NO. 100.21.1903.2021.01.11.110000
Pengambilan Negeri (Pemeriksaan)

No	Kategori	Keterangan	Nilai
1	Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
2		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
3		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
4		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
5		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
6		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
7		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
8		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
9		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
10		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
11		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
12		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
13		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
14		Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100
15	Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	Kategori 100.21.1903.2021.01.11.110000	100

10		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
11		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
12		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
13		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
14		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
15	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
16		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
17		Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
18	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
19	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100
20	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	Handwritten notes on the topic of Handwritten notes on the topic of	100

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021



REKTORAT UNIVERSITAS PADJARAN
Jalan Sekeloa Selatan 1, Bandung 40132
Telp. (022) 2534311, Fax. (022) 2534312
www.unpad.ac.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021
PEMERINTAH NEGARA PALEMBANG**



Halaman ini bersifat kerahasiaan
Klasifikasi: RASMI (R0) /
Kategori: PUBLIK / No. Klasifikasi: 001/03
DINAS SARUK - Palembang, 2021 / 0013
www.pemerintah.go.id/palembang

**RENCANA KEBUDAYAAN TAHUNAN KEMENTERIAN 2022
 RKT 2022
 2022
 Kementerian Negara Pendidikan**

No	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Angka
1	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	100
2		Kegiatan Utama	100
3		Kegiatan Utama	100
4		Kegiatan Utama	100
5		Kegiatan Utama	100
6		Kegiatan Utama	100
7		Kegiatan Utama	100
8		Kegiatan Utama	100
9		Kegiatan Utama	100
10		Kegiatan Utama	100
11		Kegiatan Utama	100
12		Kegiatan Utama	100
13		Kegiatan Utama	100
14		Kegiatan Utama	100
15		Kegiatan Utama	100
16		Kegiatan Utama	100
17		Kegiatan Utama	100
18		Kegiatan Utama	100
19		Kegiatan Utama	100
20		Kegiatan Utama	100
21		Kegiatan Utama	100
22		Kegiatan Utama	100
23		Kegiatan Utama	100
24		Kegiatan Utama	100

10		Handwritten notes on the first page	100
11		Handwritten notes on the second page	100
12		Handwritten notes on the third page	100
13		Handwritten notes on the fourth page	100
14		Handwritten notes on the fifth page	100
15		Handwritten notes on the sixth page	100
16		Handwritten notes on the seventh page	100
17		Handwritten notes on the eighth page	100
18		Handwritten notes on the ninth page	100
19		Handwritten notes on the tenth page	100
20		Handwritten notes on the eleventh page	100
21		Handwritten notes on the twelfth page	100
22		Handwritten notes on the thirteenth page	100
23		Handwritten notes on the fourteenth page	100
24		Handwritten notes on the fifteenth page	100
25		Handwritten notes on the sixteenth page	100
26		Handwritten notes on the seventeenth page	100
27		Handwritten notes on the eighteenth page	100
28		Handwritten notes on the nineteenth page	100
29		Handwritten notes on the twentieth page	100
30		Handwritten notes on the twenty-first page	100
31		Handwritten notes on the twenty-second page	100
32		Handwritten notes on the twenty-third page	100
33		Handwritten notes on the twenty-fourth page	100
34		Handwritten notes on the twenty-fifth page	100
35		Handwritten notes on the twenty-sixth page	100
36		Handwritten notes on the twenty-seventh page	100
37		Handwritten notes on the twenty-eighth page	100
38		Handwritten notes on the twenty-ninth page	100
39		Handwritten notes on the thirtieth page	100
40		Handwritten notes on the thirty-first page	100
41		Handwritten notes on the thirty-second page	100
42		Handwritten notes on the thirty-third page	100
43		Handwritten notes on the thirty-fourth page	100
44		Handwritten notes on the thirty-fifth page	100
45		Handwritten notes on the thirty-sixth page	100
46		Handwritten notes on the thirty-seventh page	100
47		Handwritten notes on the thirty-eighth page	100
48		Handwritten notes on the thirty-ninth page	100
49		Handwritten notes on the fortieth page	100
50		Handwritten notes on the forty-first page	100
51		Handwritten notes on the forty-second page	100
52		Handwritten notes on the forty-third page	100
53		Handwritten notes on the forty-fourth page	100
54		Handwritten notes on the forty-fifth page	100
55		Handwritten notes on the forty-sixth page	100
56		Handwritten notes on the forty-seventh page	100
57		Handwritten notes on the forty-eighth page	100
58		Handwritten notes on the forty-ninth page	100
59		Handwritten notes on the fiftieth page	100
60		Handwritten notes on the fifty-first page	100
61		Handwritten notes on the fifty-second page	100
62		Handwritten notes on the fifty-third page	100
63		Handwritten notes on the fifty-fourth page	100
64		Handwritten notes on the fifty-fifth page	100
65		Handwritten notes on the fifty-sixth page	100
66		Handwritten notes on the fifty-seventh page	100
67		Handwritten notes on the fifty-eighth page	100
68		Handwritten notes on the fifty-ninth page	100
69		Handwritten notes on the sixtieth page	100
70		Handwritten notes on the sixty-first page	100
71		Handwritten notes on the sixty-second page	100
72		Handwritten notes on the sixty-third page	100
73		Handwritten notes on the sixty-fourth page	100
74		Handwritten notes on the sixty-fifth page	100
75		Handwritten notes on the sixty-sixth page	100
76		Handwritten notes on the sixty-seventh page	100
77		Handwritten notes on the sixty-eighth page	100
78		Handwritten notes on the sixty-ninth page	100
79		Handwritten notes on the seventieth page	100
80		Handwritten notes on the seventy-first page	100
81		Handwritten notes on the seventy-second page	100
82		Handwritten notes on the seventy-third page	100
83		Handwritten notes on the seventy-fourth page	100
84		Handwritten notes on the seventy-fifth page	100
85		Handwritten notes on the seventy-sixth page	100
86		Handwritten notes on the seventy-seventh page	100
87		Handwritten notes on the seventy-eighth page	100
88		Handwritten notes on the seventy-ninth page	100
89		Handwritten notes on the eightieth page	100
90		Handwritten notes on the eighty-first page	100
91		Handwritten notes on the eighty-second page	100
92		Handwritten notes on the eighty-third page	100
93		Handwritten notes on the eighty-fourth page	100
94		Handwritten notes on the eighty-fifth page	100
95		Handwritten notes on the eighty-sixth page	100
96		Handwritten notes on the eighty-seventh page	100
97		Handwritten notes on the eighty-eighth page	100
98		Handwritten notes on the eighty-ninth page	100
99		Handwritten notes on the ninetieth page	100
100		Handwritten notes on the hundredth page	100

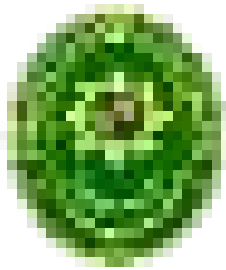


PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



**REVIU
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
TAHUN 2022**

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

REVIU

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN**

TAHUN 2022

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

NO. W6.U1/59/OT.01.1/X/2022

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Anggaran Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun 2022 	100%





ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, 1981

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧

ಪರಿಚಯ

ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧

- ಕಾಯಿದೆ**
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
- ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ**
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೮೧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೨, ೧೯೮೧.

QUESTION 1

QUESTION 1

QUESTION 1

QUESTION 2

QUESTION 2

QUESTION 3

QUESTION 3

QUESTION 4

QUESTION 4

QUESTION 5

STATE OF TEXAS
COMMISSION ON FEDERAL GOVERNMENT
REPORT OF THE COMMISSION
ON THE FEDERAL GOVERNMENT
AND THE STATE OF TEXAS

NO.	NAME	ADDRESS	RESIDENCE
1	WILLIAM W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
2	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
3	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
4	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
5	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
6	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
7	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
8	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
9	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
10	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
11	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
12	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
13	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
14	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
15	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
16	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
17	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
18	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
19	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON
20	W. W. WALKER	1111 N. WALKER	HOUSTON

COMMISSION ON FEDERAL GOVERNMENT
 REPORT OF THE COMMISSION
 ON THE FEDERAL GOVERNMENT
 AND THE STATE OF TEXAS

ANNUAL BUDGET STATEMENT 2023-2024

DATE: 15/05/2023
TIME: 10:30 AM
BY: [Signature]

NAME: [Name]
DESIGNATION: [Designation]
OFFICE: [Office Name]

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs.)		
		2022-23	2023-24	% Change
1	Salaries	1000000	1050000	5%
2	Grants	500000	500000	0%
3	Capital Expenditure	200000	200000	0%
4	Operating Expenses	300000	300000	0%
5	Interest	100000	100000	0%
6	Depreciation	100000	100000	0%
7	Provision for Contingencies	50000	50000	0%
8	Reserve for Contingencies	50000	50000	0%
9	Income Tax	100000	100000	0%
10	Income	1000000	1000000	0%
11	Expenditure	2250000	2350000	4.44%
12	Surplus/Deficit	1000000	1000000	0%
13	Income Tax	100000	100000	0%
14	Income	1000000	1000000	0%
15	Expenditure	2250000	2350000	4.44%
16	Surplus/Deficit	1000000	1000000	0%

Page No. _____
 Date: _____

Roll No. _____

Name: _____
 Section: _____

Sl. No.	Description of the work done	Grade	Remarks
1	1. Design of a shaft for a gear drive.	100%	Very good
2	2. Design of a shaft for a gear drive.	95%	Good
3	3. Design of a shaft for a gear drive.	90%	Good
4	4. Design of a shaft for a gear drive.	85%	Good
5	5. Design of a shaft for a gear drive.	80%	Good
6	6. Design of a shaft for a gear drive.	75%	Good
7	7. Design of a shaft for a gear drive.	70%	Good
8	8. Design of a shaft for a gear drive.	65%	Good
9	9. Design of a shaft for a gear drive.	60%	Good
10	10. Design of a shaft for a gear drive.	55%	Good
11	11. Design of a shaft for a gear drive.	50%	Good
12	12. Design of a shaft for a gear drive.	45%	Good
13	13. Design of a shaft for a gear drive.	40%	Good
14	14. Design of a shaft for a gear drive.	35%	Good
15	15. Design of a shaft for a gear drive.	30%	Good
16	16. Design of a shaft for a gear drive.	25%	Good
17	17. Design of a shaft for a gear drive.	20%	Good
18	18. Design of a shaft for a gear drive.	15%	Good
19	19. Design of a shaft for a gear drive.	10%	Good
20	20. Design of a shaft for a gear drive.	5%	Good

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO :
FROM :
SUBJECT :

DATE :
BY :
FOR :

1. PURPOSE AND SCOPE
2. BACKGROUND
3. DISCUSSION

NO.	DESCRIPTION OF WORK	DATE	BY	FOR	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MEMORANDUM FOR THE RECORD
DATE: _____
TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

NO.	DESCRIPTION OF WORK	DATE	BY	REMARKS	PAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REVENUE STATEMENT FOR THE YEAR 2018

REVENUE STATEMENT
FOR THE YEAR
2018

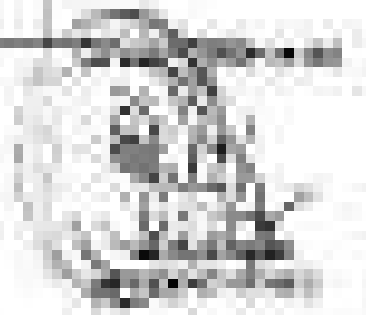
DATE: 12/31/2018
BY: [Signature]
TITLE: [Signature]
OFFICE: [Signature]

NO.	DESCRIPTION OF REVENUE	AMOUNT	PERCENTAGE	TOTAL
1	SALES	100.00	100.00	100.00
2	SALES TAX	5.00	5.00	5.00
3	RENT	10.00	10.00	10.00
4	INTEREST	1.00	1.00	1.00
5	DIVIDENDS	1.00	1.00	1.00
6	GRANTS	1.00	1.00	1.00
7	CONTRIBUTIONS	1.00	1.00	1.00
8	PROFIT	1.00	1.00	1.00
9	RESERVE	1.00	1.00	1.00
10	EXPENSES	1.00	1.00	1.00
11	NET INCOME	1.00	1.00	1.00
12	TOTAL	131.00	131.00	131.00

PROJEKTANALYSE

PROJEKTNAME: ... **PROJEKTLEITER:** ...
PROJEKTNUMMER: ... **PROJEKTSTATUS:** ...
PROJEKTSTART: ... **PROJEKTENDE:** ...

ID	Beschreibung	Schätzungen			Einheit
		Zeit	Personen	Material	
1	Projektorganisation	10	1	0	Tag
2	Projektplanung	15	2	0	Tag
3	Projektumsetzung	30	3	0	Tag
4	Projektabschluss	10	1	0	Tag
5	Projektüberprüfung	5	0,5	0	Tag
6	Projektberichterstattung	5	0,5	0	Tag
7	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
8	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
9	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
10	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
11	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
12	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
13	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
14	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
15	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
16	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
17	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
18	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
19	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
20	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
21	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
22	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
23	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
24	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
25	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
26	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
27	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
28	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
29	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
30	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
31	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
32	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
33	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
34	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
35	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
36	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
37	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
38	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
39	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
40	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
41	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
42	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
43	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
44	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
45	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
46	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
47	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
48	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
49	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag
50	Projektabschluss	5	0,5	0	Tag



REVENUE RECEIPTS

DATE: _____ **AMOUNT:** _____
TO: _____ **BY:** _____
FOR: _____ **REMARKS:** _____

Sl. No.	Description	Amount	Received By	Signature	Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

STATE OF MISSISSIPPI

Revenue and **1999** **1998**
Expenses **1999** **1998**
Operating **1999** **1998**
Income **1999** **1998**

1999

Item	1999	1998	1999	1998	1999	1998
Operating Income	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Operating Expenses	800,000	750,000	800,000	750,000	800,000	750,000
Operating Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Income Tax Expense	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Net Income	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Operating Income	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Operating Expenses	800,000	750,000	800,000	750,000	800,000	750,000
Operating Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Income Tax Expense	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Net Income	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Operating Income	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Operating Expenses	800,000	750,000	800,000	750,000	800,000	750,000
Operating Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Income Tax Expense	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Net Income	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Operating Income	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Operating Expenses	800,000	750,000	800,000	750,000	800,000	750,000
Operating Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Income Tax Expense	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Net Income	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Operating Income	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000
Operating Expenses	800,000	750,000	800,000	750,000	800,000	750,000
Operating Profit	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Income Tax Expense	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Net Income	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

STATE OF TEXAS - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

PROJECT: [Illegible]
SECTION: [Illegible]
DATE: [Illegible]

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEMS	QUANTITIES		
		AMOUNT	UNIT	PRICE
100	Excavation			
101	Backfill			
102	Gravel			
103	Asphalt			
104	Concrete			
105	Reinforcing Steel			
106	Formwork			
107	Paint			
108	Signage			
109	Lighting			
110	Drainage			
111	Retaining Wall			
112	Bridge			
113	Traffic Control			
114	Construction Management			
115	Testing			
116	Permitting			
117	Utility Relocation			
118	Environmental Mitigation			
119	Archaeological Excavation			
120	Historic Preservation			
121	Public Art			
122	Accessibility			
123	Security			
124	Emergency Response			
125	Construction Safety			
126	Quality Assurance			
127	Construction Management			
128	Testing			
129	Permitting			
130	Utility Relocation			
131	Environmental Mitigation			
132	Archaeological Excavation			
133	Historic Preservation			
134	Public Art			
135	Accessibility			
136	Security			
137	Emergency Response			
138	Construction Safety			
139	Quality Assurance			
140	Construction Management			
141	Testing			
142	Permitting			
143	Utility Relocation			
144	Environmental Mitigation			
145	Archaeological Excavation			
146	Historic Preservation			
147	Public Art			
148	Accessibility			
149	Security			
150	Emergency Response			
151	Construction Safety			
152	Quality Assurance			
153	Construction Management			
154	Testing			
155	Permitting			
156	Utility Relocation			
157	Environmental Mitigation			
158	Archaeological Excavation			
159	Historic Preservation			
160	Public Art			
161	Accessibility			
162	Security			
163	Emergency Response			
164	Construction Safety			
165	Quality Assurance			
166	Construction Management			
167	Testing			
168	Permitting			
169	Utility Relocation			
170	Environmental Mitigation			
171	Archaeological Excavation			
172	Historic Preservation			
173	Public Art			
174	Accessibility			
175	Security			
176	Emergency Response			
177	Construction Safety			
178	Quality Assurance			
179	Construction Management			
180	Testing			
181	Permitting			
182	Utility Relocation			
183	Environmental Mitigation			
184	Archaeological Excavation			
185	Historic Preservation			
186	Public Art			
187	Accessibility			
188	Security			
189	Emergency Response			
190	Construction Safety			
191	Quality Assurance			
192	Construction Management			
193	Testing			
194	Permitting			
195	Utility Relocation			
196	Environmental Mitigation			
197	Archaeological Excavation			
198	Historic Preservation			
199	Public Art			
200	Accessibility			
201	Security			
202	Emergency Response			
203	Construction Safety			
204	Quality Assurance			
205	Construction Management			
206	Testing			
207	Permitting			
208	Utility Relocation			
209	Environmental Mitigation			
210	Archaeological Excavation			
211	Historic Preservation			
212	Public Art			
213	Accessibility			
214	Security			
215	Emergency Response			
216	Construction Safety			
217	Quality Assurance			
218	Construction Management			
219	Testing			
220	Permitting			
221	Utility Relocation			
222	Environmental Mitigation			
223	Archaeological Excavation			
224	Historic Preservation			
225	Public Art			
226	Accessibility			
227	Security			
228	Emergency Response			
229	Construction Safety			
230	Quality Assurance			
231	Construction Management			
232	Testing			
233	Permitting			
234	Utility Relocation			
235	Environmental Mitigation			
236	Archaeological Excavation			
237	Historic Preservation			
238	Public Art			
239	Accessibility			
240	Security			
241	Emergency Response			
242	Construction Safety			
243	Quality Assurance			
244	Construction Management			
245	Testing			
246	Permitting			
247	Utility Relocation			
248	Environmental Mitigation			
249	Archaeological Excavation			
250	Historic Preservation			
251	Public Art			
252	Accessibility			
253	Security			
254	Emergency Response			
255	Construction Safety			
256	Quality Assurance			
257	Construction Management			
258	Testing			
259	Permitting			
260	Utility Relocation			
261	Environmental Mitigation			
262	Archaeological Excavation			
263	Historic Preservation			
264	Public Art			
265	Accessibility			
266	Security			
267	Emergency Response			
268	Construction Safety			
269	Quality Assurance			
270	Construction Management			
271	Testing			
272	Permitting			
273	Utility Relocation			
274	Environmental Mitigation			
275	Archaeological Excavation			
276	Historic Preservation			
277	Public Art			
278	Accessibility			
279	Security			
280	Emergency Response			
281	Construction Safety			
282	Quality Assurance			
283	Construction Management			
284	Testing			
285	Permitting			
286	Utility Relocation			
287	Environmental Mitigation			
288	Archaeological Excavation			
289	Historic Preservation			
290	Public Art			
291	Accessibility			
292	Security			
293	Emergency Response			
294	Construction Safety			
295	Quality Assurance			
296	Construction Management			
297	Testing			
298	Permitting			
299	Utility Relocation			
300	Environmental Mitigation			
301	Archaeological Excavation			
302	Historic Preservation			
303	Public Art			
304	Accessibility			
305	Security			
306	Emergency Response			
307	Construction Safety			
308	Quality Assurance			
309	Construction Management			
310	Testing			
311	Permitting			
312	Utility Relocation			
313	Environmental Mitigation			
314	Archaeological Excavation			
315	Historic Preservation			
316	Public Art			
317	Accessibility			
318	Security			
319	Emergency Response			
320	Construction Safety			
321	Quality Assurance			
322	Construction Management			
323	Testing			
324	Permitting			
325	Utility Relocation			
326	Environmental Mitigation			
327	Archaeological Excavation			
328	Historic Preservation			
329	Public Art			
330	Accessibility			
331	Security			
332	Emergency Response			
333	Construction Safety			
334	Quality Assurance			
335	Construction Management			
336	Testing			
337	Permitting			
338	Utility Relocation			
339	Environmental Mitigation			
340	Archaeological Excavation			
341	Historic Preservation			
342	Public Art			
343	Accessibility			
344	Security			
345	Emergency Response			
346	Construction Safety			
347	Quality Assurance			
348	Construction Management			
349	Testing			
350	Permitting			
351	Utility Relocation			
352	Environmental Mitigation			
353	Archaeological Excavation			
354	Historic Preservation			
355	Public Art			
356	Accessibility			
357	Security			
358	Emergency Response			
359	Construction Safety			
360	Quality Assurance			
361	Construction Management			
362	Testing			
363	Permitting			
364	Utility Relocation			
365	Environmental Mitigation			
366	Archaeological Excavation			
367	Historic Preservation			
368	Public Art			
369	Accessibility			
370	Security			
371	Emergency Response			
372	Construction Safety			
373	Quality Assurance			
374	Construction Management			
375	Testing			
376	Permitting			
377	Utility Relocation			
378	Environmental Mitigation			
379	Archaeological Excavation			
380	Historic Preservation			
381	Public Art			
382	Accessibility			
383	Security			
384	Emergency Response			
385	Construction Safety			
386	Quality Assurance			
387	Construction Management			
388	Testing			
389	Permitting			
390	Utility Relocation			
391	Environmental Mitigation			
392	Archaeological Excavation			
393	Historic Preservation			
394	Public Art			
395	Accessibility			
396	Security			
397	Emergency Response			
398	Construction Safety			
399	Quality Assurance			
400	Construction Management			
401	Testing			
402	Permitting			
403	Utility Relocation			
404	Environmental Mitigation			
405	Archaeological Excavation			
406	Historic Preservation			
407	Public Art			

STATE OF TEXAS
COMMISSION ON
GOVERNMENT
REORGANIZATION

REPORT
 OF THE
 COMMISSION
 TO THE
 GOVERNOR

CHAPTER	TITLE	SECTION	SUBSECTION	DESCRIPTION	PAGE
1	Organization of the State				
2	Executive Branch				
3	Legislative Branch				
4	Judicial Branch				
5	Statewide Offices				
6	Local Government				
7	Statewide Services				
8	Statewide Programs				
9	Statewide Administration				
10	Statewide Finance				
11	Statewide Information				
12	Statewide Security				
13	Statewide Health				
14	Statewide Education				
15	Statewide Transportation				
16	Statewide Energy				
17	Statewide Environment				
18	Statewide Agriculture				
19	Statewide Industry				
20	Statewide Labor				
21	Statewide Housing				
22	Statewide Community Development				
23	Statewide Public Works				
24	Statewide Public Safety				
25	Statewide Cultural Affairs				
26	Statewide Parks and Recreation				
27	Statewide Historical Preservation				
28	Statewide Archives				
29	Statewide Library Services				
30	Statewide Information Technology				
31	Statewide Telecommunications				
32	Statewide Postal Services				
33	Statewide Air Mail				
34	Statewide Federal Relations				
35	Statewide International Relations				
36	Statewide Foreign Trade				
37	Statewide Trade Policy				
38	Statewide Trade Agreements				
39	Statewide Trade Disputes				
40	Statewide Trade Remedies				
41	Statewide Trade Facilitation				
42	Statewide Trade Promotion				
43	Statewide Trade Development				
44	Statewide Trade Capacity Building				
45	Statewide Trade Policy Review				
46	Statewide Trade Policy Impact Assessment				
47	Statewide Trade Policy Consultation				
48	Statewide Trade Policy Coordination				
49	Statewide Trade Policy Implementation				
50	Statewide Trade Policy Monitoring and Evaluation				

Approved and Forwarded:

 Governor

